



KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROFIL

**PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Semester 2 Tahun 2018





KATA SAMBUTAN

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat akan dapat dicapai dengan baik, bila didukung dengan tersedianya data dan informasi yang benar, akurat dan lengkap guna proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pemanfaatan database kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474/8458/MD tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan secara periodik setiap tahunnya, yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan bahan analisis dalam memacu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melaksanakan sebahagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk itu perlu disusun buku *"Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Semester 2 tahun 2018."* yang merupakan gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan setiap tahunnya.

Guna membantu mewujudkan terpadunya perencanaan pembangunan ke depan, Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Semester 2 Tahun 2018 dapat dijadikan *basic data* dan informasi dalam penyamaan persepsi. Oleh karena itu hendaknya buku ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Painan, Juni 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

i | Page



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat juga karunia kesehatan kepada tim penyusun **"Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Semester 2 Tahun 2018"** ini, sehingga buku ini dapat disajikan sedemikian rupa yang diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan pemangku kepentingan lainnya.

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dipergunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Buku ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sektor-sektor pembangunan daerah maupun pelaku pelayanan publik lainnya, dan sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Disadari keberadaan buku ini masih banyak kekurangan yang masih memungkinkan untuk dikritisi, diberi saran yang konstruktif serta masukan lainnya demi kesempurnaan penyajian dan penggunaan buku ini.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah bekerja secara maksimal guna menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Semester 2 Tahun 2018 ini, mulai pengumpulan data, pengolahan maupun mengeditingnya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada pengguna diucapkan terima kasih atas saran dan masukan guna penyempurnaan dimasa datang.

Painan, Juni 2019
KEPALA DINAS,



EVAFUZA YULIASMAN,
DT. MA. TIGO LAREH, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP.19670712 199202 1 001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian Umum	4
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN.....	7
A. Letak Geografi	16
B. Penduduk	17
BAB III KUANTITAS PENDUDUK.....	18
A. Jumlah dan Persebaran Penduduk	17
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi	23
C. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial	30
D. Keluarga	42
BAB IV KUALITAS PENDUDUK.....	51
A. Kelahiran	51
B. Ekonomi	52
BAB V MOBILITAS PENDUDUK.....	55
BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	58
A. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	58
B. Kepemilikan Akta Kelahiran	60
C. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	63
BAB VII PENUTUP.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	19
Tabel 2	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah	20
Tabel 3	Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	22
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	24
Tabel 5	Rasio Menurut Jenis Kelamin	26
Tabel 6	Rasio Ketergantungan Usia non Produktif terhadap usia Produktif	28
Tabel 7	Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin	29
Tabel 8	Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	31
Tabel 9	Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan	33
Tabel 10	Penduduk Menurut Status Hubungan dalam Keluarga	34
Tabel 11	Penduduk Menurut Status Perkawinan	36
Tabel 12	Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Kelompok Umur	38
Tabel 13	Penduduk Menurut Agama	40
Tabel 14	Penduduk Menurut Jenis Kecacatan	41
Tabel 15	Rata-rata Anggota Keluarga	43
Tabel 16	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin	45
Tabel 17	Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur	46
Tabel 18	Kepala Keluarga Menurut Pendidikan	47
Tabel 19	Kepala Keluarga Menurut status Kawin	49
Tabel 20	Rasio Anak Balita Terhadap Perempuan Usia 15 - 49 Tahun	51
Tabel 21	Penduduk Menurut Angka Partisipasi Kerja	53
Tabel 22	Penduduk menurut Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk	57
Tabel 23	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	59
Tabel 24	Kepemilikan akta Kelahiran Untuk Penduduk Anak	62
Tabel 25	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kabupaten Pesisir Selatan.....	8
Gambar 2	Peta Kecamatan Pancung Soal	9
Gambar 3	Peta Kecamatan Ranah Pesisir	9
Gambar 4	Peta Kecamatan Lengayang	10
Gambar 5	Peta Kecamatan Batang Kapas	10
Gambar 6	Peta Kecamatan IV Jurai	11
Gambar 7	Peta Kecamatan Bayang.....	11
Gambar 8	Peta Kecamatan Koto XI Tarusan	12
Gambar 9	Peta Kecamatan Sutera	12
Gambar 10	Peta Kecamatan Linggo Sari Baganti	13
Gambar 11	Peta Kecamatan Lunang	13
Gambar 12	Peta Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	14
Gambar 13	Peta Kecamatan Bayang Utara	14
Gambar 14	Peta Kecamatan Airpura.....	15
Gambar 15	Peta Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	15
Gambar 16	Peta Kecamatan Silaut.....	16
Gambar 17	Peta Pulau Sumatera	16
Gambar 18	Peta Kabupaten Pesisir Selatan Bagian Propinsi Sumatera Barat	17



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	18
Grafik 2	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah ..	20
Grafik 3	Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan	22
Grafik 4	Piramida Umur Penduduk	24
Grafik 5	Rasio Menurut Jenis Kelamin	26
Grafik 6	Rasio Ketergantungan Usia non Produktif terhadap usia Produktif	28
Grafik 7	Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin	29
Grafik 8	Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	31
Grafik 9	Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan.....	33
Grafik 10	Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga	34
Grafik 11	Penduduk Menurut Status Perkawinan	36
Grafik 12	Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Kelompok Umur ..	37
Grafik 13	Penduduk Menurut Agama	39
Grafik 14	Penduduk Menurut Jenis Kecacatan	40
Grafik 15	Rata-rata Anggota Keluarga	43
Grafik 16	Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin	44
Grafik 17	Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur	45
Grafik 18	Kepala Keluarga Menurut Pendidikan	47
Grafik 19	Kepala Keluarga Menurut status Kawin	48
Grafik 20	Rasio Anak Balita Terhadap Perempuan Usia 15 - 49 Tahun	51
Grafik 21	Penduduk Menurut Angka Partisipasi Kerja	53
Grafik 22	Penduduk menurut Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk	56
Grafik 23	Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).....	59
Grafik 24	Kepemilikan akta Kelahiran.....	61
Grafik 25	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Sesuai amanatkan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)* dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan berbagai variabel, agar tujuan pembangunan tersebut berhasil, pembangunan baik fisik maupun sosial merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memperhatikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang tidak memperhatikan *pembangunan kependudukan*, akan merugikan karena setiap keuntungan ekonomi akan digunakan untuk membiayai kebutuhan penduduk.

Perkembangan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara *kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk*. Pembangunan kependudukan merupakan isu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan.



Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan (Kabupaten, Kecamatan dan Nagari) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Data dan informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan. *Undang-Undang No. 52 Tahun 2009* tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada Pasal 49 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Penduduk juga memiliki hak dan kewajiban dalam perkembangan kependudukan. Penduduk berhak untuk mendapatkan *pelayanan administrasi kependudukan*, sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Penduduk juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut diri dan keluarganya termasuk mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang *tidak melanggar hak-hak penduduk*.

Pemerintah Pusat merencanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu ada peningkatan pelayanan masyarakat, keamanan Negara, serta peningkatan kualitas demokrasi dalam pemilu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah sepakat untuk melaksanakan dan mensukseskan 3 (tiga) program strategis nasional dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.



Tiga program tersebut adalah berupa (1) *Pemutakhiran Data Kependudukan*, (2) *Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)* dan (3) *Penerapan KTP elektronik (KTP-el)*.

Data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

B. Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 per 31 Desember 2018 sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan. Dalam pengolahan administrasi kependudukan terdiri dari Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam database kependudukan, pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penyajian data sebagai informasi data kependudukan dan pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan masalah kependudukan, maka ruang lingkup penyusunan perkembangan kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan ini meliputi perkembangan kependudukan Tahun 2018 per 31 Desember 2018, dengan cakupan data antara lain:

1. *Kuantitas penduduk*, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. *Kualitas penduduk* meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial.
3. *Mobilitas penduduk* meliputi mobilitas permanen, mobilitas non permanen urbanisasi.
4. *Kepemilikan dokumen kependudukan*.



D. Pengertian Umum terhadap Istilah yang digunakan dalam Profil Perkembangan Kependudukan

Dalam rangka memberikan kesamaan persepsi tentang beberapa istilah yang digunakan maka beberapa pengertian umum yang ada dalam penyusunan profil kependudukan ini adalah sebagai berikut :

1. *Penduduk* adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. *Kependudukan* adalah ikhwal yang berkaitan dengan jumlah struktur pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. *Perkembangan kependudukan* adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
4. *Data Kependudukan* adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. *Administrasi kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. *Kuantitas penduduk* adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
7. *Kualitas penduduk* adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan kenikmatan kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebebasan dan hidup layak.



8. *Mobilitas penduduk* adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah.
9. *Profil perkembangan penduduk* adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.
10. *Persebaran penduduk* adalah kondisi sebaran penduduk secara kewilayahan.
11. *Peristiwa kependudukan* adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau surat tanda kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggi terbatas menjadi tinggal tetap.
12. *Peristiwa penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. *Kematian atau mortabilitas* adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap kelahiran hidup.
14. *Rasio jenis kelamin* adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu.
15. *Mobilitas penduduk permanen (migrasi)* adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/Negara (migrasi internasional).
16. *Mobilitas penduduk non permanen (circulation/sirkuler)* adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif.
17. *Migrasi kembali (return migration)* adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendapatan bertempat tinggal di daerah yang berbeda.



18. *Migrasi semasa hidup (life time migration)* adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat kelahirannya.
19. *Migrasi riset (recent migration)* adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
20. *Penduduk usia kerja* adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
21. *Angka partisipasi angkatan kerja* adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
22. *Pengangguran* adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak berkerja dan sedang mencari kerja.
23. *Angka pengangguran* adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
24. *Bukan angkatan kerja* adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas.



BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di pantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan pintu gerbang masuk di wilayah selatan propinsi ini. Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Secara administrasi, sejak tahun 2012, melalui peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7, 8 dan 9 tentang pemekaran kecamatan, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan 182 nagari dan 480 kampung, dengan luas wilayah administratif daratan $\pm 6.049,34 \text{ km}^2$.

Perubahan wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan pada pemekaran kecamatan, dari 12 kecamatan menjadi 15 kecamatan, menurut peraturan daerah, yakni:

1. Perda No 7 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
2. Perda No 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
dan
3. Perda No 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut.

Panjang pantai Kabupaten Pesisir Selatan $\pm 234 \text{ km}$, serta memiliki 53 pulau kecil. Kabupaten ini dilalui oleh 22 aliran sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia dengan hulu sungai berada di bagian timur wilayah. Sungai terpanjang adalah Batang Tarusan yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, yakni mencapai $\pm 437 \text{ kilometer}$.

Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan langsung dengan 2 (dua) provinsi, yakni Provinsi Jambi disebelah Timur dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. **Kota Painan** merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 1. Peta Kabupaten Pesisir Selatan

Kelima belas kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pangkajene (130101), Ranah Pesisir (130102), Lengayang (130103), Batang Kapas (130104), IV Jurai (130105), Bayang (130106), Koto XI Tarusan (130107), Sutera (130108), Linggo Sari Baganti (130109), Lunang (130110), Basa Ampek Balai Tapan (130111), IV Nagari Bayang Utara (130112), Airpura (130113), Ranah Ampek Hulu Tapan (130114), dan Silaut (130115),

Kecamatan Lengayang merupakan kecamatan terbesar dengan

luas wilayah 632,96 km², sedangkan Kecamatan Bayang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 80,92 km².

Nama *Pesisir Selatan* berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda, *afdeling zuid beneden landen* (dataran rendah bagian selatan).

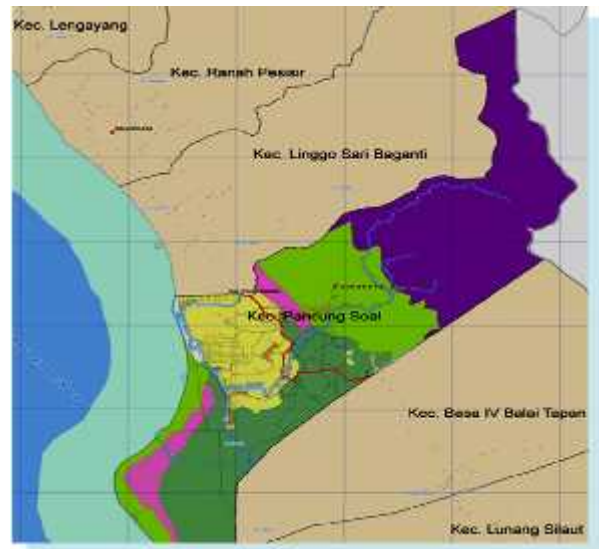
Ketika itu pada Tahun 1903 wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan Kerinci menjadi *afdeeling* yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Inderapura sebagai pusat pemerintahan.



Melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 daerah ini menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957 dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi, namanya berubah menjadi Pesisir Selatan saja.

Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan

1. **Kecamatan Pancung Soal (kode Kec 130101)**, berpusat di **Inderapura** sudah melakukan pemekaran wilayah dengan kecamatan Airpura, dari 20 nagari menjadi 10 nagari yakni Inderapura, Muaro Sakai Inderapura, Tiga Sepakat Inderapura, Inderapura Barat, Kudo-Kudo Inderapura, Inderapura Selatan, Simpang Lama Inderapura, Tigo Sungai Inderapura, Tluk Amplu Inderapura dan Inderapura Tengah.



Gambar 2. Peta Kecamatan Pancung Soal

2. **Kecamatan Ranah Pesisir (kode Kec 130102)**, Ibukota Kecamatannya **Balai Selasa**,



Gambar 3. Peta Kecamatan Ranah Pesisir

awalnya terdiri dari nagari Palangai (Balai Salasa) dan nagari Sungai Tunu. Sekarang menjadi 10 nagari yakni Pelangai, Sungai Tunu, Sungai Tunu Utara, Sungai Tunu Barat, Nyiur Melambai Pelangai, Sungai Liku Pelangai, Koto VIII Pelangai, Pelangai Gadang, Pelangai Kaciak, dan Pasia Pelangai.

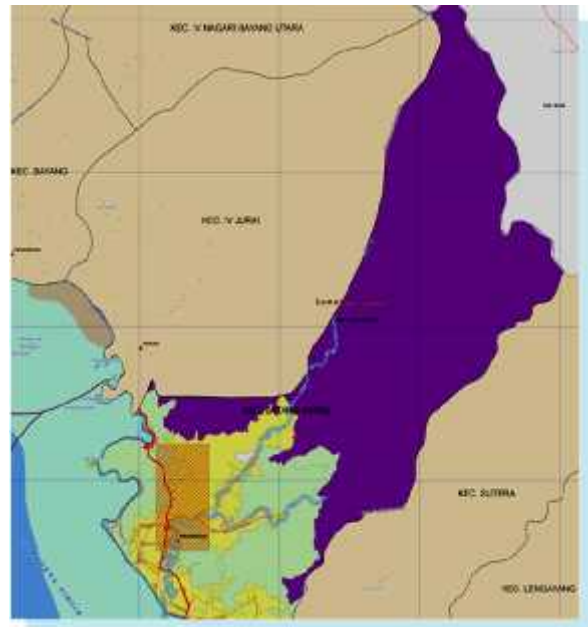


3. **Kecamatan Lengayang (Kode Kec 130103)**, awalnya terdiri dari dua nagari yaitu Kambang dan Lakitan. **Kambang** merupakan Ibukota Kecamatan dengan wilayah asal penyebaran dari masyarakat Bandar Sepuluh. Nenek moyang dari Sungai Pagu turun melalui Kambang kemudian menyebar ke utara (Sutera dan Batang Kapas) dan sebagian menyebar ke selatan (Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti). Sekarang Lengayang sudah terdiri dari 9 nagari yakni Kambang, Lakitan, Kambang Utara, Kambang Timur, Kambang Barat, Lakitan Utara, Lakitan Selatan, Lakitan Timur, dan Lakitan Tengah.



Gambar 4. Peta Kecamatan Lengayang

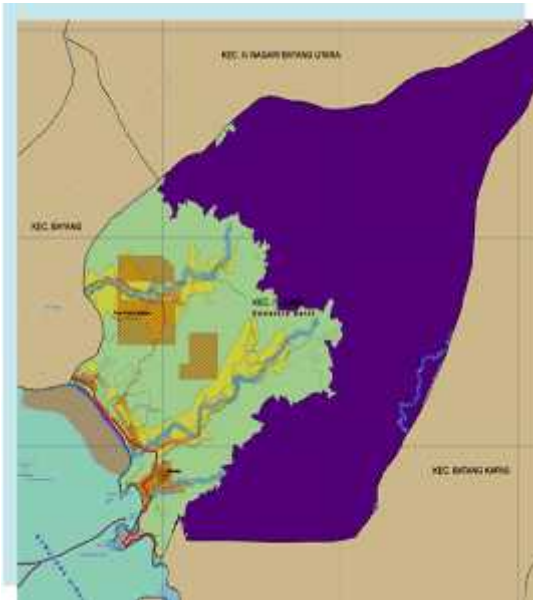
4. **Kecamatan Batang Kapas (Kode Kec 130104)**, merupakan kepala dari Bandar Sepuluh, awalnya terdiri dari 5 Nagari yaitu Nagari IV Koto Hilie, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, IV Koto Mudiak, Taluak, dengan Ibu kota Kecamatan **Pasar Kuok**, saat ini terdiri dari 9 nagari yakni IV Koto Hilie, IV Koto Mudiak, Taluak, Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Teratak Tempatih IV Koto Mudiak, Tuik IV Koto Mudiak, Sungai Nyalo IV Koto Mudiak, dan Taluk Tigo Sakato.



Gambar 5. Peta Kecamatan Batang Kapas



5. **Kecamatan IV Jurai (Kode Kec 130105)**, dengan ibukota **Salido**. Awalnya terdiri dari nagari Lumpo, Sago, Salido dan Painan. Sejak tahun 2009 sudah dimekarkan menjadi



Gambar 6. Peta Kecamatan IV Jurai

20 nagari, yakni Painan, Tambang, Salido, Lumpo, Bungo Pasang Salido, Sago Salido, Salido Sari Bulan, Koto Rawang, Limau Gadang Lumpo, Batu Kunik Lumpo, Taratak Tengah Lumpo, Ampuan Lumpo, Ampang Tareh Lumpo, Balai Sinayan Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, Sungai Sariak Lumpo, Bukik Kaciak Lumpo, Gunung Bungkuak Lumpo, Painan Selatan Painan, dan Painan Timur Painan. Disini terletak *pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan*, yaitu kota Painan.

6. **Kecamatan Bayang (Kode Kec 130106)**, awalnya disebut sebagai nagari Bayang Nan



Gambar 7. Peta Kecamatan Bayang

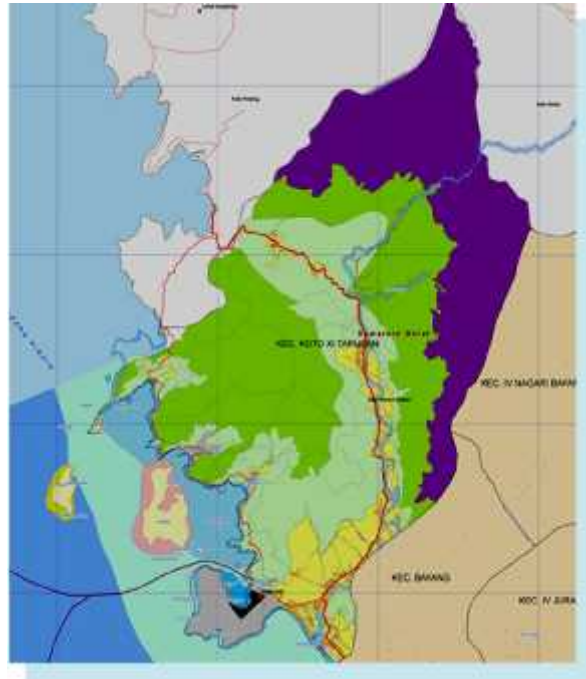
Tujuh karena terdiri dari tujuh koto, dengan Ibukota Kecamatan **Pasar Baru**. Kemudian sejak tahun 2011 dimekarkan menjadi 19 nagari, yakni nagari Koto Berapak, Talaok, Pasar Baru, Gurun Panjang, Api-Api Pasar Baru, Tanjung Durian Pasar Baru, Asam Kamba Pasar Baru, Sawah Laweh Pasar Baru, Kapeh Panji Jaya Talaok, Aur Begalung Talaok, Kapelgam Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak, Kubang Koto Berapak, Kapujan Koto Berapak, Gurun Panjang Utara, Gurun Panjang Barat, dan Gurun Panjang Selatan.



7. **Kecamatan Koto XI Tarusan (Kode Kec 130107)**, awalnya terdiri dari 11 nagari.

Dengan Ibukota Kecamatan **Nanggalo**.

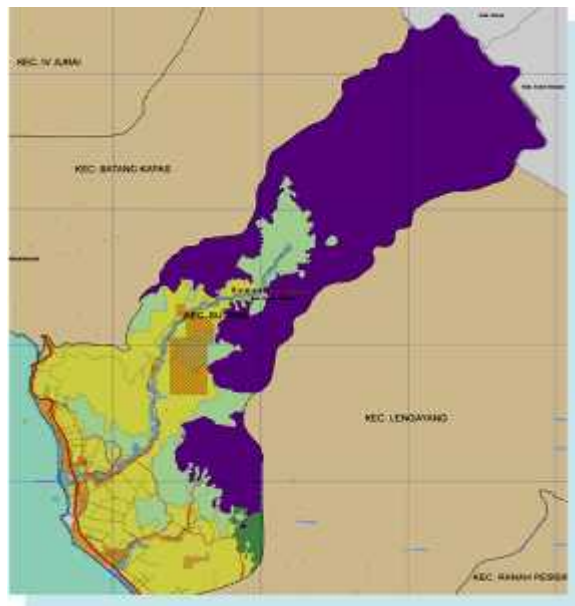
Sejak tahun 2011 dimekarkan menjadi 23 nagari, yakni nagari Siguntur, Sungai Pinang, Duku, Batu Hampa, Nanggalo, Ampang Pulau, Kapuh, Barung-Barung Belantai, Taratak Sungai Lundang, Barung-Barung Belantai Selatan, Mandeh, Kapuh Utara, Siguntur Tua, Kampung Baru Korong Nan IV, Duku Utara, Pulau Karam Ampang Pulau, Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau, Carocok Anau Ampang Pulau, Sungai Nyalo Mudik Aia, Batu Hampar Selatan, Barung-Barung Belantai Timur, Barung-Barung Belantai Tengah, dan Setara Nanggalo.



Gambar 8. Peta Kecamatan Koto XI Tarusan

8. **Kecamatan Sutera (Kode Kec 130108)**, merupakan singkatan dari nama tiga nagari

yaitu Surantih, Taratak dan Ampiang Parak dengan Ibukota Kecamatan **Surantih**. Sejak tahun 2011 dimekarkan menjadi 12 nagari, yakni nagari Taratak, Surantih, Amping Parak, Amping Parak Timur, Koto Taratak, Lansano Taratak, Aur Duri Surantih, Rawang Gunung Malelo Surantih, Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Koto Nan Tigo Utara Surantih, Ganting Mudiak Selatan Surantih dan Ganting Mudiak Utara Surantih.



Gambar 9. Peta Kecamatan Sutera

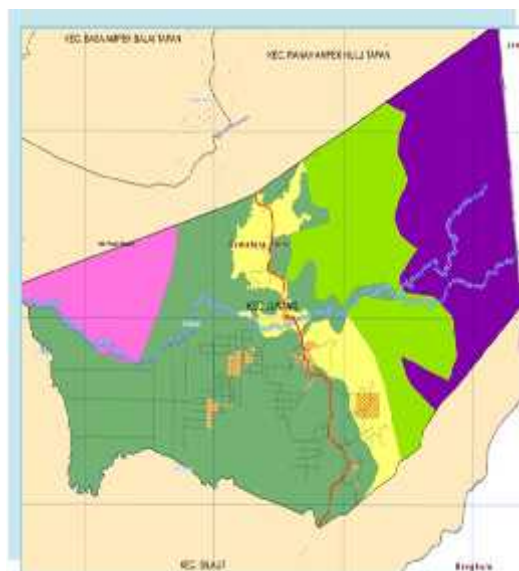
9. Kecamatan Linggo Sari Baganti (Kode Kec 130109) dengan ibukota Kecamatan **Air**



Gambar 10. Peta Kecamatan Linggo Sari Baganti

Haji. Awalnya terdiri dari nagari Punggasan dan Air Haji, merupakan ekor dari Bandar Sepuluh. Sejak tahun 2011 dimekarkan menjadi 16 nagari yakni nagari Punggasan, Air Haji, Punggasan Utara, Punggasan Timur, Padang XI Punggasan, Lagan Mudik Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, Air Haji Tenggara, Pasar Lama Muara Air Haji, Pasar Bukit Air Haji, Air Haji Barat, Air Haji Tengah, Rantau Simalenang Air Haji, Muaro Gadang Air Haji, Sungai Sirah Air Haji, dan Muaro Kandis Punggasan.

10. *Kecamatan Lunang (Kode Kec 130110)*, tempat berkedudukannya Mande Rubiah.



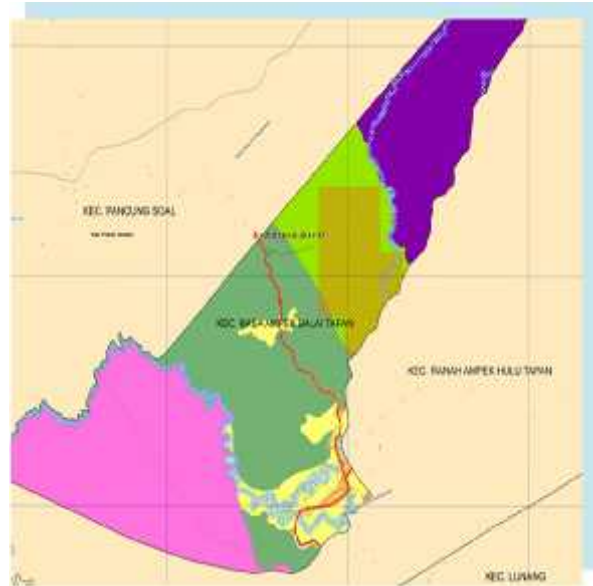
Gambar 11. Peta Kecamatan Lunang

Sebagian wilayah **Lunang** adalah daerah transmigrasi. Sejak tahun 2012 sudah melakukan pemekaran wilayah dengan kecamatan Silaut. Kecamatan Lunang terdiri dari 10 nagari, yakni nagari Lunang, Lunang Utara, Lunang Selatan, Lunang Barat, Sindang Lunang, Pondok Parian Lunang, Lunang Tengah, Lunang Satu, Lunang Dua, dan Lunang Tiga.



11. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (Kode Kec 130111), dengan ibukota

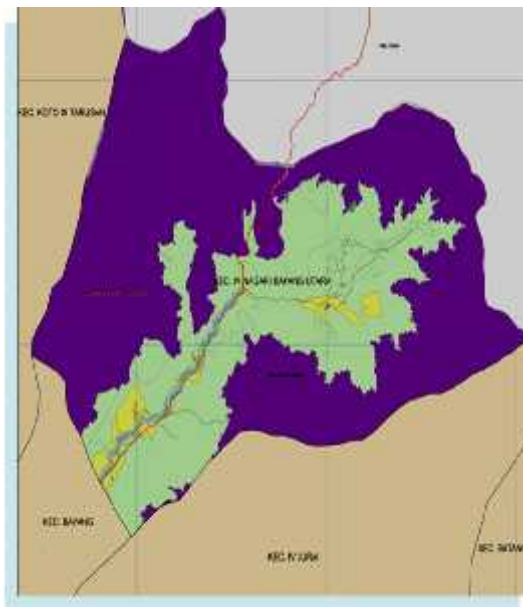
Kecamatannya **Tapan**. Sejak tahun 2012 sudah melakukan pemekaran wilayah dengan kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan. Kecamatan Basa Ampek Hulu Tapan terdiri dari 10 nagari, yakni nagari Tapan, Pasar Tapan, Batang Arah Tapan, Ampang Tulak Tapan, Tanjung Pondok Tapan, Batang Betung Tapan, Bukit Buai Tapan, Riak Danau Tapan, Koto Anau Tapan, dan Dusun Baru Tapan. Di Tapan terdapat persimpangan jalan menuju Kerinci, Padang dan Bengkulu.



Gambar 12. Peta Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

12. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara (Kode Kec 130112), dengan ibukota

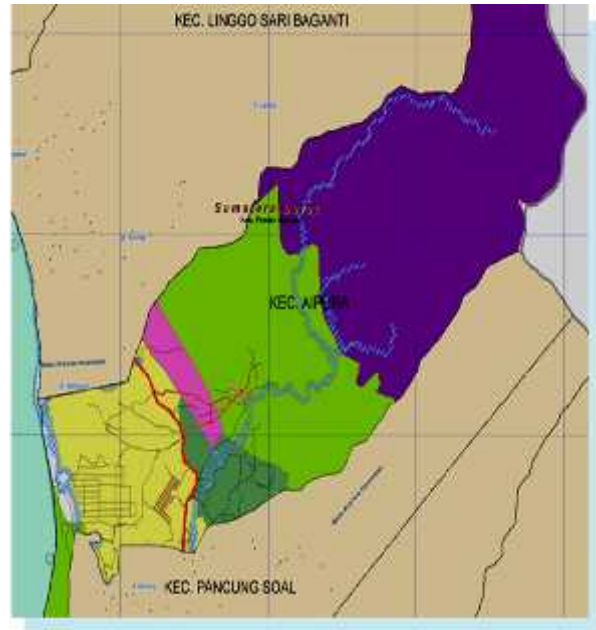
Kecamatannya **Asam Kumbang**. Awalnya disebut Koto Nan Salapan, terdiri dari nagari Puluik-Puluik, Muaro Aie, Pancung Taba, Ngalau Gadang, Limau-limau dan Taratak Nan Tigo (Teleng, Pisang dan Baru). Sejak tahun 2011 dimekarkan menjadi 6 nagari, yakni nagari Puluik-Puluik Selatan, Puluik-Puluik, Koto Ranah, Muaro Aie, Pancung Taba, dan Limau Gadang Pancung Taba.



Gambar 13. Peta Kecamatan Bayang Utara

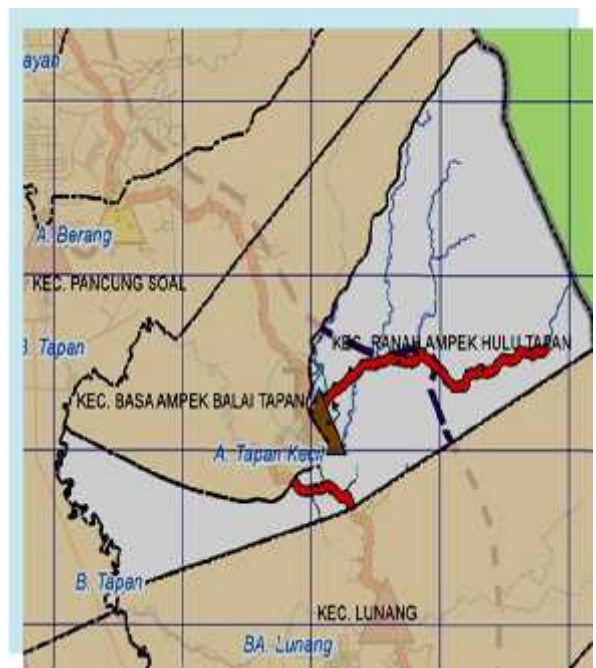


13. **Kecamatan Airpura (Kode Kec 130113)**, dengan ibukota **Tamuan**, merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Pancung Soal pada tahun 2012. Terdiri dari 10 nagari, yakni nagari Inderapura Utara, Muara Inderapura, Damar Lapan Batang Inderapura, Lalang Panjang Inderapura, Palokan Inderapura, Lubuk Betung Inderapura, Taluak Kualo Inderapura, Tanah Bakali Inderapura, Inderapura Timur, dan Pulau Rajo Inderapura.



Gambar 14. Peta Kecamatan Airpura

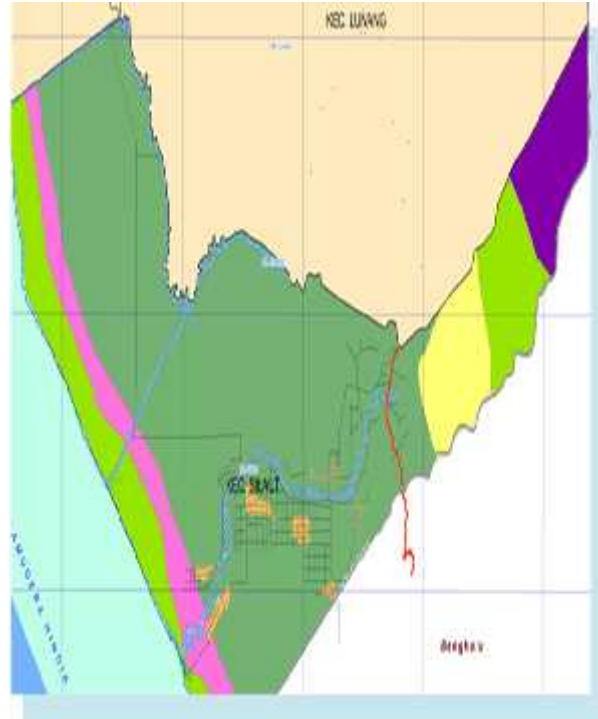
14. **Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (Kode Kec 130114)**, dengan ibukota **Pasar Beriang**, merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada tahun 2012. Terdiri dari 10 nagari, yakni nagari Sungai Gambir Sako Tapan, Limau Purut Tapan, Talang Balarik Tapan, Tebing Tinggi Tapan, Binjai Tapan, Sungai Pinang Tapan, Talang Koto Pulai Tapan, Kampung Tengah Tapan, Kubu Tapan, dan Simpang Gunung Tapan.



Gambar 15. Peta Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan



15. Kecamatan Silaut (Kode Kec 130115), dengan ibukota **Silaut**, terdiri dari 10 nagari yang dimekarkan dari Kecamatan Lunang Silaut pada tahun 2012. Pemerintahan Nagari di kecamatan Silaut yaitu nagari Silaut, Sungai Sirah, Sungai Sarik, Sungai Pulai, Pasir Binjai, Talang Binjai, Durian Seribu, Lubuk Bunta, Air Hitam, dan Sambungo. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan transmigrasi. Silaut adalah daerah paling selatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu.



Gambar 16. Peta Kecamatan Silaut

A. Letak Geografi

Kabupaten Pesisir Selatan terletak antara $100^{\circ}19'$ – $101^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}59'$ – $2^{\circ}28,6'$ Lintang Selatan. Topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung-gunung dan berbukit-bukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit barisan, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0 – 1000 meter. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu :



Gambar 17. Peta Pulau Sumatera



Sebelah Utara : berbatasan dengan Kota Padang
Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan,
Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu
Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

B. Penduduk

Kabupaten Pesisir Selatan berpenduduk 508.691 jiwa pada tahun 2018 per 31 Desember 2018, terdiri dari 257.040 jiwa penduduk laki-laki dan 251.651 jiwa penduduk perempuan, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Jumlah Penduduk terbesar ada di kecamatan Lengayang yaitu sebanyak 63.446 jiwa, terdiri dari 32.087 jiwa penduduk laki-laki dan 31.359 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan berpenduduk terkecil di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu sebanyak 8.820 jiwa, terdiri dari 4.390 jiwa penduduk laki-laki dan 4.430 jiwa penduduk perempuan.



Gambar 18. Peta Kab.Pesisir Selatan
Prop. Sumatera Barat



BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kuantitas penduduk adalah merupakan jumlah keseluruhan penduduk yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses demografi seperti fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi/perpindahan penduduk. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah 6.049,33 km² didiami penduduk (keadaan semester II Tahun 2018) sebanyak 508.691 jiwa, terdiri dari 257.040 jiwa laki-laki dan 251.651 jiwa perempuan. Penduduk ini tersebar di 15 (lima belas) kecamatan yaitu *Kecamatan Pancung Soal* (130101), *Kecamatan Ranah Pesisir* (130102), *Kecamatan Lengayang* (130103), *Kecamatan Batang Kapas* (130104), *Kecamatan IV Jurai* (130105), *Kecamatan Bayang* (130106), *Kecamatan Koto XI Tarusan* (130107), *Kecamatan Sutera* (130108), *Kecamatan Linggo Sari Baganti* (130109), *Kecamatan Lunang* (130110), *Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan* (130111), *Kecamatan IV Nagari Bayang Utara* (130112), *Kecamatan Airpura* (130113), *Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan* (130114), dan *Kecamatan Silaut* (130115).

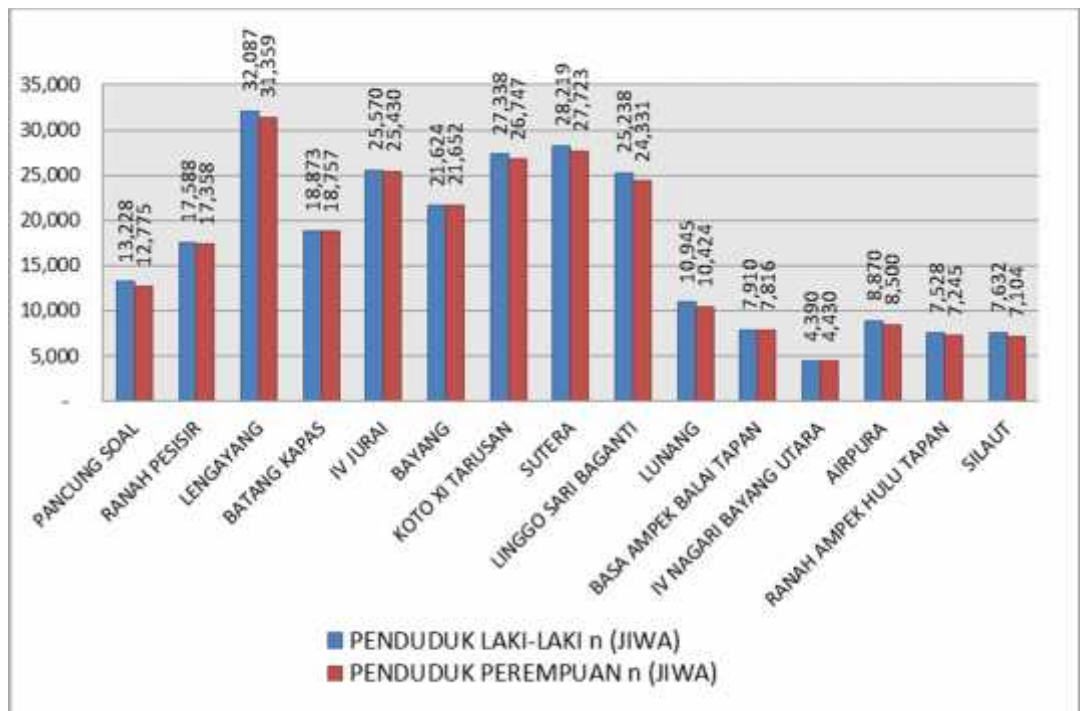
Pada table 1. Dibawah ini terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Lengayang yaitu 63.446 jiwa (12.47%), sedangkan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 8.820 Jiwa (1.73%).



Tabel 1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2+PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
13.01.01	PANCUNG SOAL	13,228	2.60	12,775	2.51	26,003	5.11
13.01.02	RANAH PESISIR	17,588	3.46	17,358	3.41	34,946	6.87
13.01.03	LENGAYANG	32,087	6.31	31,359	6.16	63,446	12.47
13.01.04	BATANG KAPAS	18,873	3.71	18,757	3.69	37,630	7.40
13.01.05	IV JURAI	25,570	5.03	25,430	5.00	51,000	10.03
13.01.06	BAYANG	21,624	4.25	21,652	4.26	43,276	8.51
13.01.07	KOTO XI TARUSAN	27,338	5.37	26,747	5.26	54,085	10.63
13.01.08	SUTERA	28,219	5.55	27,723	5.45	55,942	11.00
13.01.09	LINGGO SARI BAGANTI	25,238	4.96	24,331	4.78	49,569	9.74
13.01.10	LUNANG	10,945	2.15	10,424	2.05	21,369	4.20
13.01.11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	7,910	1.55	7,816	1.54	15,726	3.09
13.01.12	IV NAGARI BAYANG UTARA	4,390	0.86	4,430	0.87	8,820	1.73
13.01.13	AIRPURA	8,870	1.74	8,500	1.67	17,370	3.41
13.01.14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	7,528	1.48	7,245	1.42	14,773	2.90
13.01.15	SILAUT	7,632	1.50	7,104	1.40	14,736	2.90
TOTAL PESISIR SELATAN		257,040	50.53	251,651	49.47	508,691	100.00
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							

Grafik 1. Penduduk Menurut Jenis Kelamin





2. Kepadatan Penduduk

Kecamatan Bayang merupakan kecamatan yang paling padat penduduk dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara kecamatan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, hal ini dapat dilihat pada tabel. 2 dibawah ini.

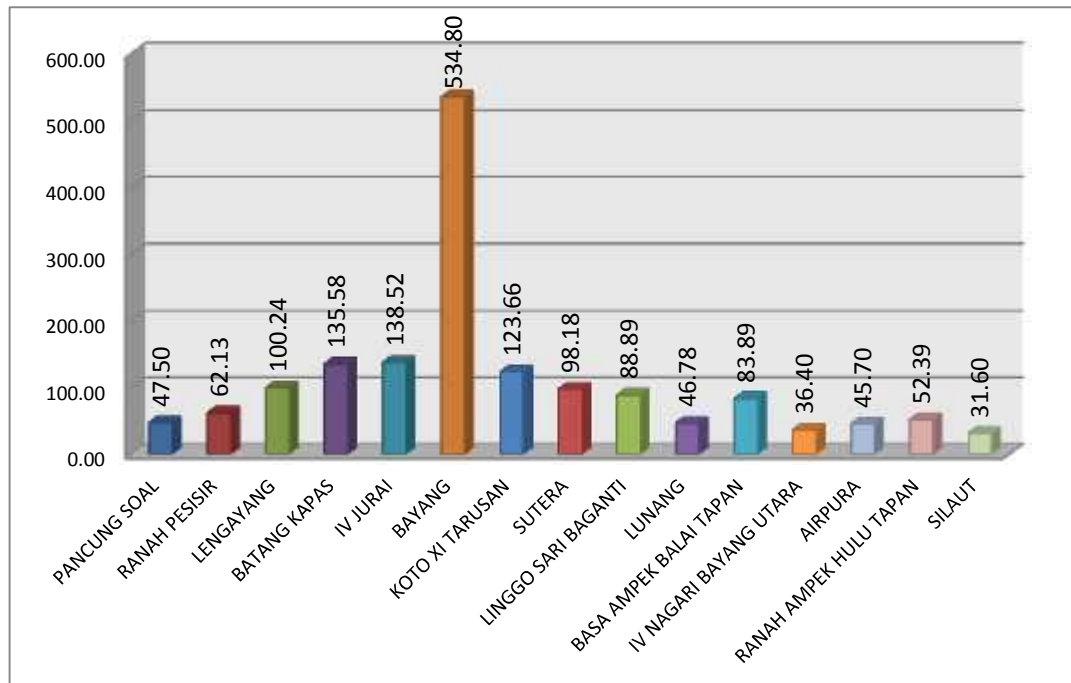
Tabel. 2 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah 6.049,33 km². Kabupaten Pesisir Selatan didiami oleh 508.691 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 84.09 jiwa/km². Artinya rata-rata setiap km² wilayah Kabupaten Pesisir Selatan didiami sebanyak ± 84 jiwa/km².

Tabel 2. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah

KODE KEC	KECAMATAN	PENDUDUK		LUAS WILAYAH (km2)	KEPADATAN PENDUDUDUK (JIWA)
		n (JIWA)	(%)		
130101	PANCUNG SOAL	26.003	5.1	547.41	47.50
130102	RANAH PESISIR	34.946	6.9	562.44	62.13
130103	LENGAYANG	63.446	12.5	632.96	100.24
130104	BATANG KAPAS	37.630	7.4	277.54	135.58
130105	IV JURAI	51.000	10.0	368.19	138.52
130106	BAYANG	43.276	8.5	80.92	534.80
130107	KOTO XI TARUSAN	54.085	10.6	437.37	123.66
130108	SUTERA	55.942	11.0	569.81	98.18
130109	LINGGO SARI BAGANTI	49.569	9.7	557.66	88.89
130110	LUNANG	21.364	4.2	456.73	46.78
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	15.726	3.1	187.46	83.89
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	8.820	1.7	242.33	36.40
130113	AIRPURA	17.370	3.4	380.10	45.70
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	14.773	2.9	281.96	52.39
130115	SILAUT	14.741	2.9	466.45	31.60
TOTAL PESISIR SELATAN		508,691	100.0	6,049.33	84.09
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018					



Grafik 2. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Menurut Luas Wilayah



Jika dilihat persebaran di setiap kecamatan nampak bahwa Kecamatan Bayang merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 534,80 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan IV Jurai sebesar 138,52 jiwa/km², Kecamatan Batang Kapas sebesar 135,58 jiwa/km², Kecamatan Koto XI Tarusan sebesar 123,66 jiwa/km², Kecamatan Lengayang sebesar 100,24 jiwa/km², Kecamatan Sutera sebesar 98,18 jiwa/km², Kecamatan Linggo Sari Baganti sebesar 88,89 jiwa/km², Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebesar 83,89 jiwa/km², Kecamatan Ranah Pesisir sebesar 62,13 jiwa/km², Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebesar 52,39 jiwa/km², Kecamatan Pancung Soal sebesar 47,50 jiwa/km², Kecamatan Lunang sebesar 46,78 jiwa/km², Kecamatan Airpura sebesar 45,70 jiwa/km², Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebesar 36,40 jiwa/km² dan sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kecamatan Silaut sebesar 31,60 jiwa/km².



Kabupaten Pesisir Selatan bisa menjadi Kabupaten yang tidak merata pertumbuhan penduduknya yang akan berdampak terhadap tidak meratanya pembangunan dan tidak tertatanya tata ruang bangunan dengan baik. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga harus menjadi perhatian, terutama dalam perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jadi ketiga hal ini harus diperhatikan dengan baik.

3. *Pertumbuhan Penduduk*

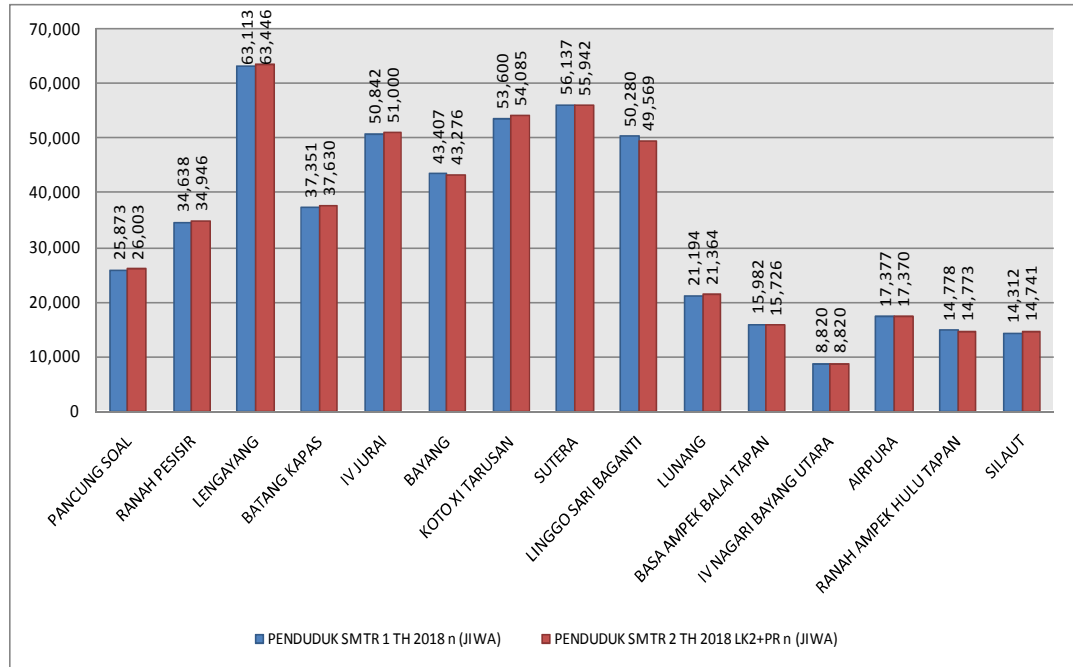
Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah (peristiwa kelahiran dan kematian) maupun migrasi penduduk (peristiwa perpindahan masuk dan perpindahan keluar). Angka pertambahan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

KODE KEC	KECAMATAN	PENDUDUK SMTR 1 TH 2018		PENDUDUK SMTR 2 TH 2018					
				LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2+PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
130101	PANCUNG SOAL	25,873	5.1	13,228	2.60	12,775	2.51	26,003	5.1
130102	RANAH PESISIR	34,638	6.8	17,588	3.46	17,358	3.41	34,946	6.9
130103	LENGAYANG	63,113	12.4	32,087	6.31	31,359	6.16	63,446	12.5
130104	BATANG KAPAS	37,351	7.4	18,873	3.71	18,757	3.69	37,630	7.4
130105	IV JURAI	50,842	10.0	25,570	5.03	25,430	5.00	51,000	10.0
130106	BAYANG	43,407	8.6	21,624	4.25	21,652	4.26	43,276	8.5
130107	KOTO XI TARUSAN	53,600	10.6	27,338	5.37	26,747	5.26	54,085	10.6
130108	SUTERA	56,137	11.1	28,219	5.55	27,723	5.45	55,942	11.0
130109	LINGGO SARI BAGANTI	50,280	9.9	25,238	4.96	24,331	4.78	49,569	9.7
130110	LUNANG	21,194	4.2	10,945	2.15	10,424	2.05	21,364	4.2
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	15,982	3.2	7,910	1.55	7,816	1.54	15,726	3.1
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	8,820	1.7	4,390	0.86	4,430	0.87	8,820	1.7
130113	AIRPURA	17,377	3.4	8,870	1.74	8,500	1.67	17,370	3.4
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	14,778	2.9	7,528	1.48	7,245	1.42	14,773	2.9
130115	SILAUT	14,312	2.8	7,632	1.50	7,104	1.40	14,741	2.9
TOTAL PESISIR SELATAN		507,704	100.0	257,040	50.53	251,651	49.47	508,691	100.0
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018									



Grafik 3. Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan



B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena berbagai penyakit, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.



Tabel 4. Penduduk Menurut Kelompok Umur

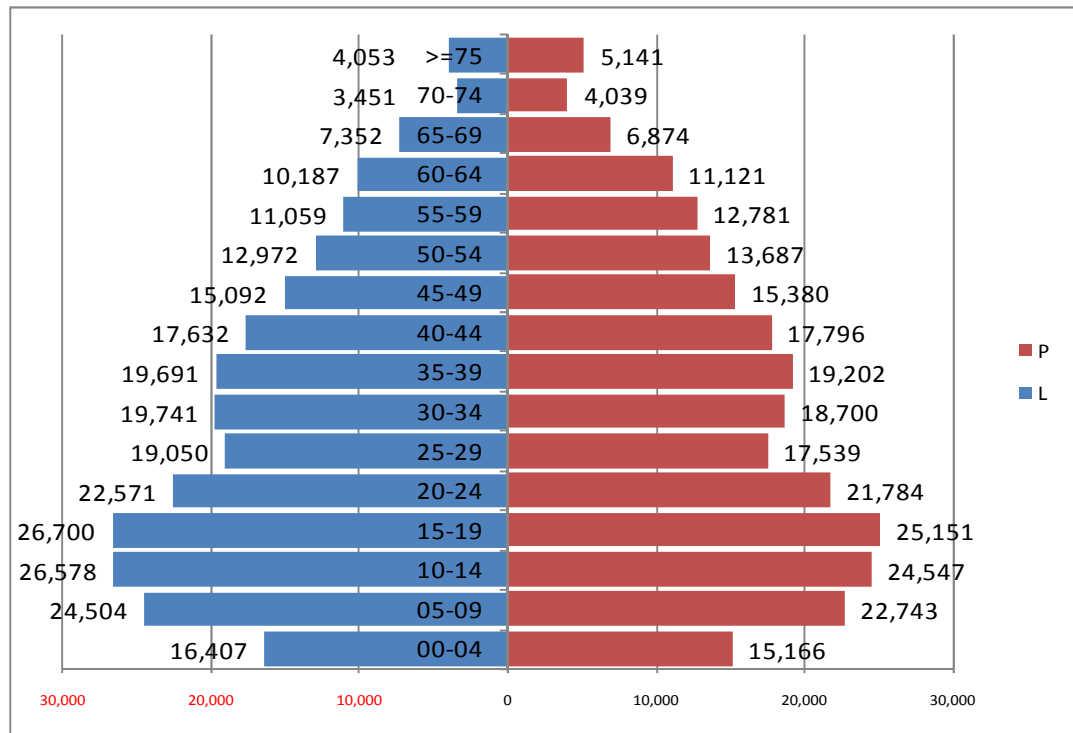
NO	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2+PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	00-04	16,407	3.2	15,166	3.0	31,573	6.2
2	05-09	24,504	4.8	22,743	4.5	47,247	9.3
3	10-14	26,578	5.2	24,547	4.8	51,125	10.1
4	15-19	26,700	5.3	25,151	4.9	51,851	10.2
5	20-24	22,571	4.4	21,784	4.3	44,355	8.7
6	25-29	19,050	3.7	17,539	3.5	36,589	7.2
7	30-34	19,741	3.9	18,700	3.7	38,441	7.6
8	35-39	19,691	3.9	19,202	3.8	38,893	7.7
9	40-44	17,632	3.5	17,796	3.5	35,428	7.0
10	45-49	15,092	3.0	15,380	3.0	30,472	6.0
11	50-54	12,972	2.6	13,687	2.7	26,659	5.2
12	55-59	11,059	2.2	12,781	2.5	23,840	4.7
13	60-64	10,187	2.0	11,121	2.2	21,308	4.2
14	65-69	7,352	1.5	6,874	1.4	14,226	2.8
15	70-74	3,451	0.7	4,039	0.8	7,490	1.5
16	>= 75	4,053	0.8	5,141	1.0	9,194	1.8
TOTAL PESISIR SELATAN		257,040	50.5	251,651	49.5	508,691	100.0
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							

Kelompok penduduk berusia antara 15-19 tahun yaitu 10,2% dari penduduk Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kelompok umur yang terbanyak. Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Pada sisi yang lain pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 15,5% penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berusia 9 tahun ke bawah. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat juga digambarkan dengan grafik yang berbentuk piramida di bawah ini.



Grafik 4. Piramida Umur Penduduk



2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan secara adil. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.



Tabel 5. Rasio Menurut Jenis Kelamin

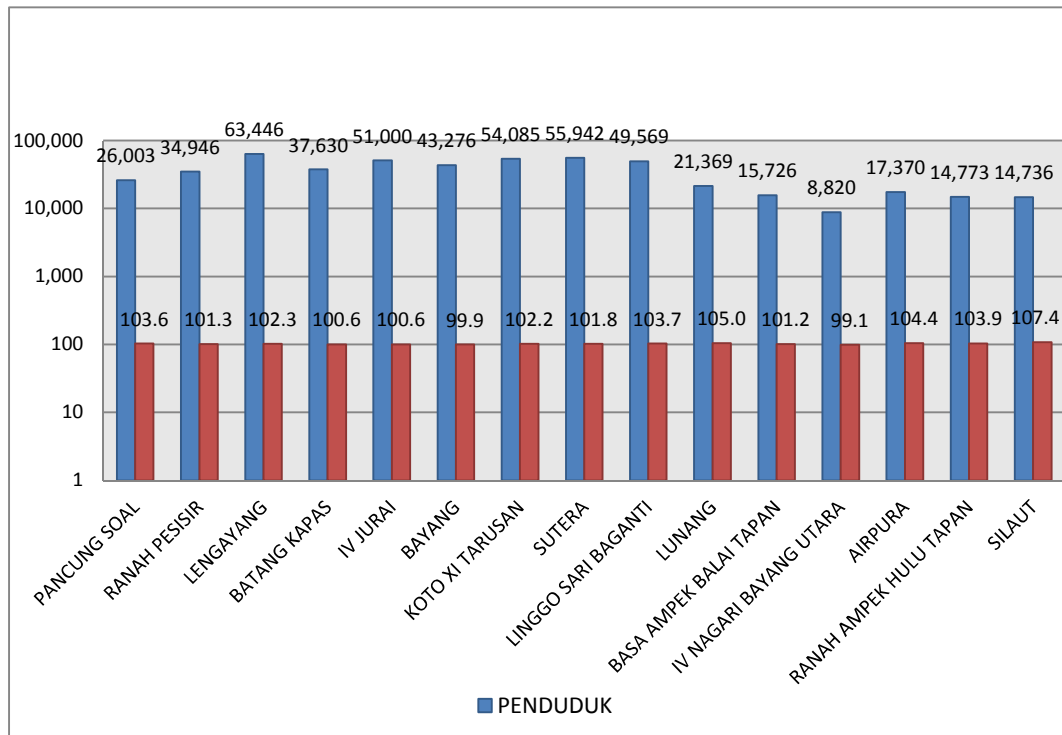
KODE KEC	KECAMATAN	PENDUDUK						RASIO JENIS KELAMIN	KETERANGAN
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2 + PR			
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)		
130101	PANCUNG SOAL	13.228	2.60	12.775	2.51	26.003	5.11	103.6	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
130102	RANAH PESISIR	17.588	3.46	17.358	3.41	34.946	6.87	101.3	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
130103	LENGAYANG	32.087	6.31	31.359	6.16	63.446	12.47	102.3	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
130104	BATANG KAPAS	18.873	3.71	18.757	3.69	37.630	7.40	100.6	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
130105	IV JURAI	25.570	5.03	25.430	5.00	51.000	10.03	100.6	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
130106	BAYANG	21.624	4.25	21.652	4.26	43.276	8.51	99.9	Dlm 100 Pr ada 100 Lk
130107	KOTO XI TARUSAN	27.338	5.37	26.747	5.26	54.085	10.63	102.2	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
130108	SUTERA	28.219	5.55	27.723	5.45	55.942	11.00	101.8	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
130109	LINGGO SARI BAGANTI	25.238	4.96	24.331	4.78	49.569	9.74	103.7	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
130110	LUNANG	10.945	2.15	10.424	2.05	21.369	4.20	105.0	Dlm 100 Pr ada 105 Lk
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	7.910	1.55	7.816	1.54	15.726	3.09	101.2	Dlm 100 Pr ada 101 Lk
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	4.390	0.86	4.430	0.87	8.820	1.73	99.1	Dlm 100 Pr ada 99 Lk
130113	AIRPURA	8.870	1.74	8.500	1.67	17.370	3.41	104.4	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	7.528	1.48	7.245	1.42	14.773	2.90	103.9	Dlm 100 Pr ada 104 Lk
130115	SILAUT	7.632	1.50	7.104	1.40	14.736	2.90	107.4	Dlm 100 Pr ada 107 Lk
TOTAL PESISIR SELATAN		257,040	50.53	251,651	49.47	508,691	100.00	102.1	Dlm 100 Pr ada 102 Lk
Sumber :	Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018								

Dari tabel 5, menunjukkan bahwa Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Pesisir Selatan pada Semester II Tahun 2018 sebesar 102,1 yang berarti bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki.

Jika lebih lanjut dilihat menurut wilayah kecamatan, pada Table. 5 terlihat bahwa rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di 13 (tiga belas) kecamatan di atas 100, hanya 2 (dua) kecamatan yang nilainya dibawah 100 yaitu Kecamatan Bayang (99,9) dan kecamatan IV Nagari Bayang Utara (99,1).



Grafik 5. Rasio Menurut Jenis Kelamin



Jika diamati masing-masing wilayah Kecamatan, maka terlihat bahwa kecamatan Silaut memiliki Rasio jenis kelamin tertinggi (107,4), diikuti kecamatan Lunang (105,0), kecamatan Airpura (104,4), kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan (103,9), kecamatan Linggo Sari Baganti (103,7), kecamatan Pancung Soal sebesar (103,6), kecamatan Lengayang (102,3), kecamatan Koto XI Tarusan (102,2), kecamatan Sutera (101,8), kecamatan Ranah Pesisir (101,3), kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (101,2), kecamatan Batang Kapas dan dikecamatan IV Jurai masing-masing (100,6). Rasio jenis kelamin terendah terdapat di kecamatan Bayang (99,9) dan kecamatan IV Nagari Bayang Utara (99,1).

3. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau



lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

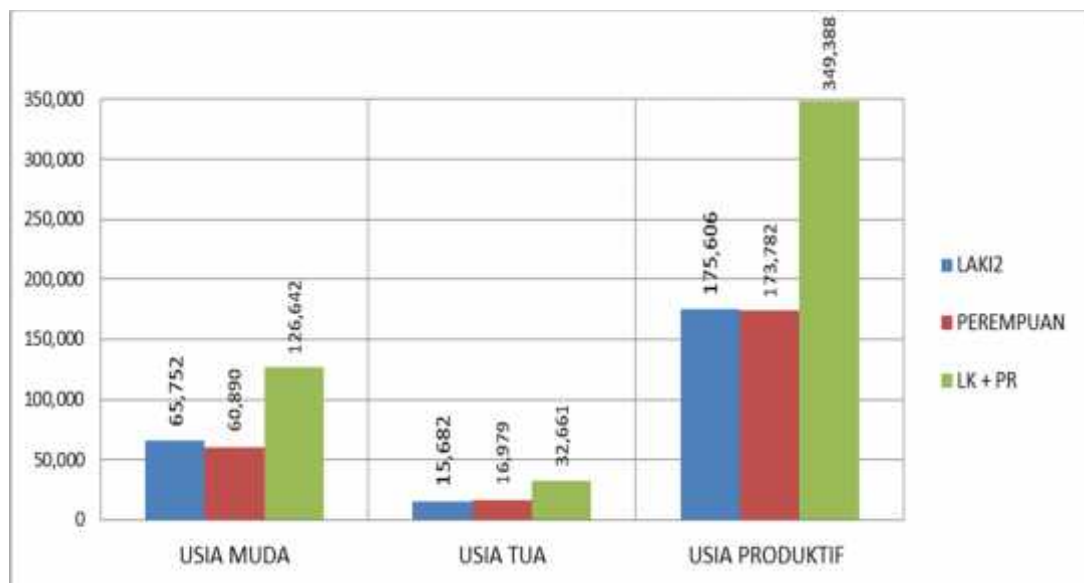
Tabel 6. Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif

NO	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN			RASIO KETERGANTUNGAN
		LAKIZ	PEREMPUAN	LK + PR	
1.	USIA MUDA	65,752	60,890	126,642	36.25
2.	USIA TUA	15,682	16,979	32,661	9.35
4.	USIA PRODUKTIF	175.606	173.782	349,388	45.59
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018					

Dari Tabel 6. diatas nampak rasio ketergantungan sebesar 45,59. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai beban tanggungan sebanyak antara 45 sampai 46 jiwa penduduk non produktif. Rasio ketergantungan sebesar 45,59 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 36,25 dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 9,35. Hal ini menunjukkan bahwa angka beban ketergantungan usia muda yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka beban ketergantungan secara total.



Grafik 6. Rasio Ketergantungan Usia Non Produktif Terhadap Usia Produktif



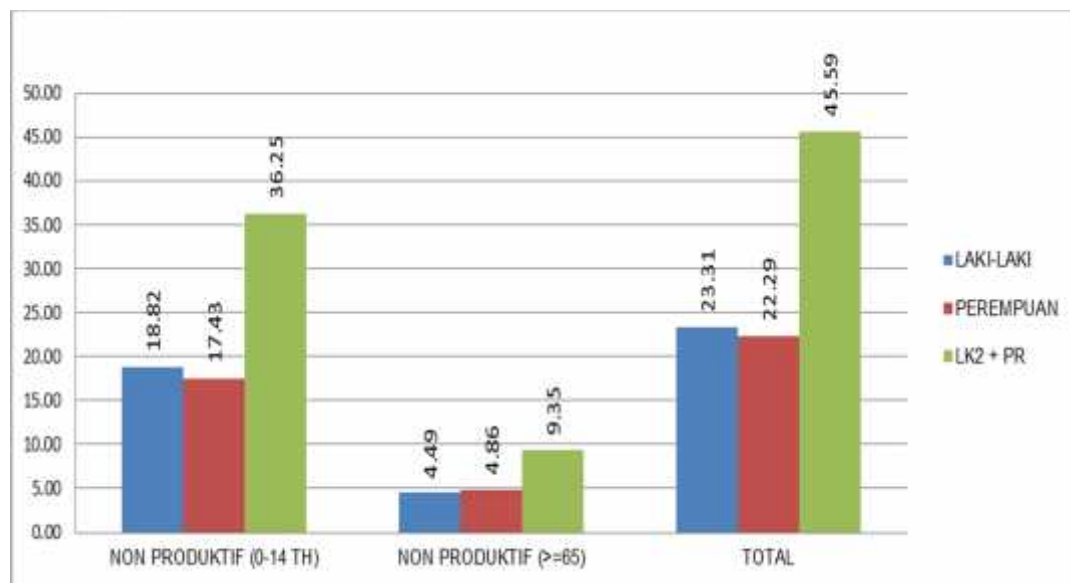
Jika diperhatikan menurut jenis kelamin pada Grafik 6, jumlah penduduk usia produktif laki-laki sebesar 175.606 jiwa, lebih besar dari pada penduduk usia produktif perempuan sebesar 173.782 jiwa. Hal yang berbeda terbalik pada kelompok penduduk usia tua yaitu penduduk laki-laki sebesar 15.682 jiwa, lebih kecil dibandingkan penduduk perempuan sebesar 16.979 jiwa. Sedangkan pada kelompok penduduk usia muda terlihat bahwa penduduk laki-laki sebesar 65.752 jiwa, lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan sebesar 60.890 jiwa.

Tabel 7. Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	RASIO KETERGANTUNGAN TERHADAP USIA PRODUKTIF		
		NON PRODUKTIF (0-14 TH)	NON PRODUKTIF (>=65)	TOTAL
1.	LAKI-LAKI	18.82	4.49	23.31
2.	PEREMPUAN	17.43	4.86	22.29
3.	LK2 + PR	36.25	9.35	45.59
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018				



Grafik 7. Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin



Rasio ketergantungan secara total Kabupaten Pesisir Selatan jika dirinci menurut jenis kelamin, pada penduduk usia muda (0 - 14 tahun) nampak bahwa angka beban tanggungan laki-laki (23,31) lebih besar dari pada perempuan (22,29), tetapi pada penduduk usia tua (≥ 65 tahun) angka beban tanggungan perempuan (4,86), lebih tinggi dari pada laki-laki (4,49). Pada kelompok penduduk usia tua (≥ 65 tahun), penduduk perempuan terus bertambah dan jumlahnya melebihi penduduk laki-laki karena usia penduduk perempuan relatif lebih panjang.

C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*.



Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang penduduk dengan dibuktikan adanya Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang maka tentu hasilnya akan berbeda dengan definisi di atas.

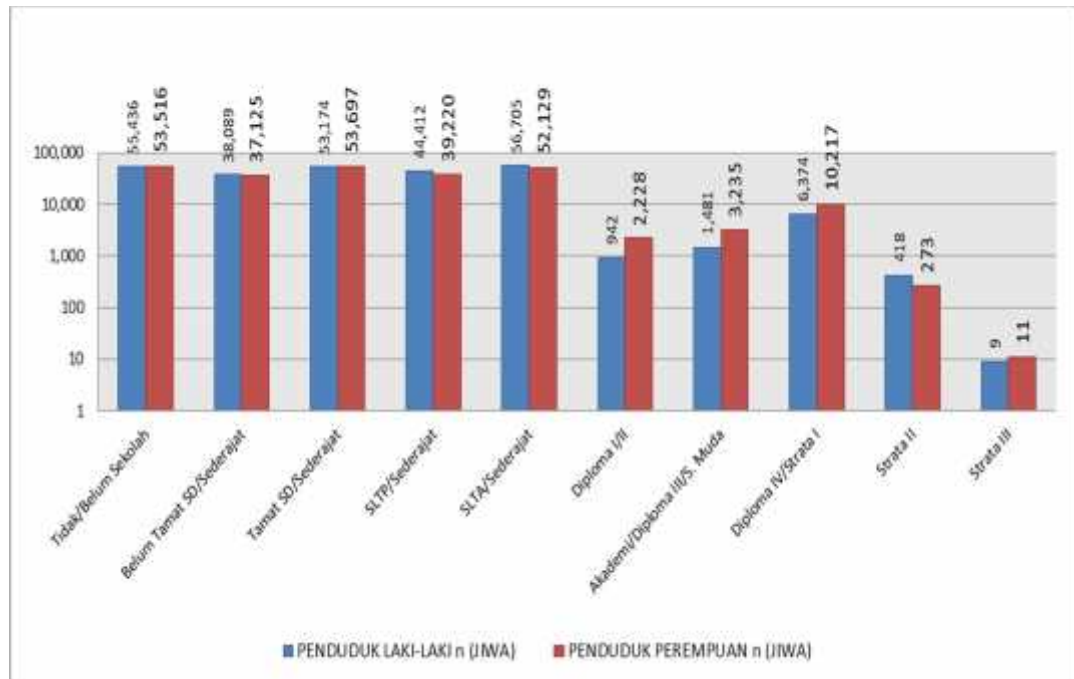
Tabel 8. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2+PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	55.436	10.9	53.516	10.5	108.952	21.4
2	Belum Tamat SD/Seederajat	38.089	7.5	37.125	7.3	75.214	14.8
3	Tamat SD/Seederajat	53.174	10.5	53.697	10.6	106.871	21.0
4	SLTP/Seederajat	44.412	8.7	39.220	7.7	83.632	16.4
5	SLTA/Seederajat	56.705	11.1	52.129	10.2	108.834	21.4
6	Diploma I/II	942	0.2	2.228	0.4	3.170	0.6
7	Akademi/Diploma III/IV . Muda	1.481	0.3	3.235	0.6	4.716	0.9
8	Diploma IV/Strata I	6.374	1.3	10.217	2.0	16.591	3.3
9	Strata II	418	0.1	273	0.1	691	0.1
10	Strata III	9	0.0	11	0.0	20	0.0
TOTAL PESISIR SELATAN		257,040	50.53	251,651	49.47	508,691	100.0
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							

Jika dilihat dari table 8 di atas, persentase penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk laki-laki (11,1%) lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan (10,2%). Permintaan pasar tenaga kerja yang mensyaratkan minimal pendidikan SLTA, menyebabkan penduduk berusaha untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut untuk bisa masuk ke pasar kerja non pertanian.



Grafik 8. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



Peningkatan pendidikan *vocasional*, akses ke pendidikan terutama untuk penduduk miskin, perlu dilakukan mengingat bahwa sebagian besar peluang kerja membutuhkan tenaga terdidik yang memiliki keterampilan khusus. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu memperhatikan kondisi di atas mengingat bahwa di era globalisasi saat ini tingkat pendidikan sumber daya manusia menjadi ukuran keberhasilan persaingan.

2. Penduduk Menurut Kelompok Jenis Pekerjaan

Indikator ini akan menunjukkan angka penduduk yang bekerja menurut kelompok jenis pekerjaan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Angka indikator ini akan berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam memfokuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang bekerja menurut kelompok pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 9.



Tabel 9. Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan

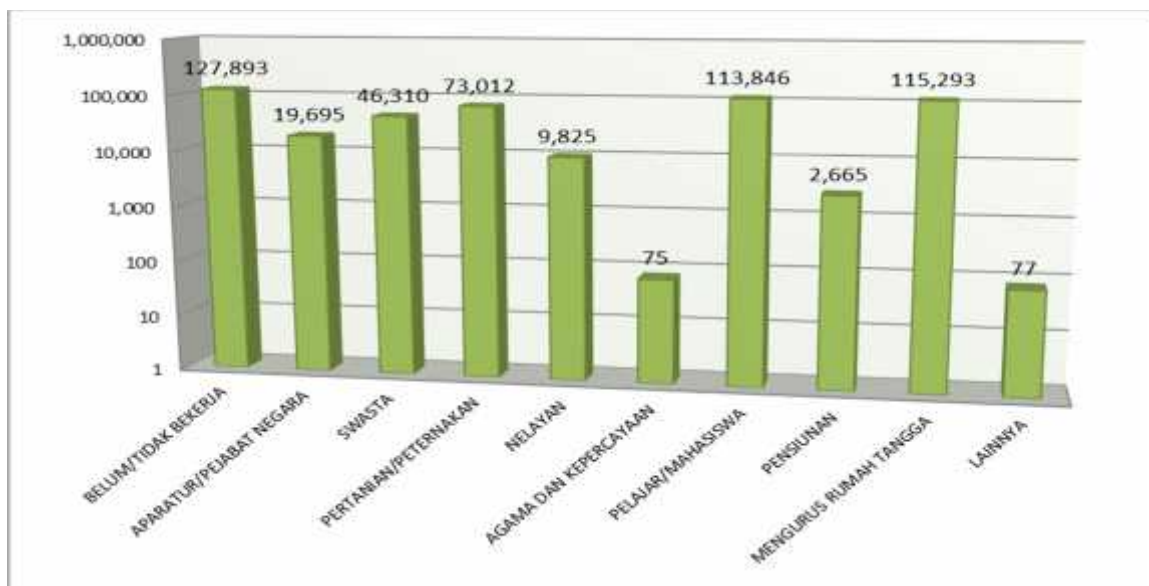
NO	KELOMPOK JENIS PEKERJAAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2 + PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	68,542	13.47	59,351	11.67	127,893	25.14
2	APARATUR/PEJABAT NEGAR.	7,796	1.53	11,899	2.34	19,695	3.87
3	SWASTA	41,160	8.09	5,150	1.01	46,310	9.10
4	PERTANIAN/PETERNAKAN	68,075	13.38	4,937	0.97	73,012	14.35
5	NELAYAN	9,759	1.92	66	0.01	9,825	1.93
6	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	74	0.01	1	0.00	75	0.01
7	PELAJAR/MAHASISWA	60,039	11.80	53,807	10.58	113,846	22.38
8	PENSIUNAN	1,527	0.30	1,138	0.22	2,665	0.52
9	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0.00	115,293	22.66	115,293	22.66
10	LAINNYA	68	0.01	9	0.00	77	0.02
TOTAL PESISIR SELATAN		257,040	50.53	251,651	49.47	508,691	100
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							

Pada Tabel 9. di atas dapat dilihat bahwa persentase kelompok jenis pekerjaan terbanyak yang menjadi sumber pendapatan penduduk kabupaten Pesisir Selatan adalah Pertanian/Peternakan yaitu sebanyak 73.012 jiwa (14,35%). Kemudian diikuti oleh kelompok jenis pekerjaan Swasta sebanyak 46.310 jiwa (9.10%).

Dari angka kelompok jenis pekerjaan terbanyak tersebut terlihat bahwa penduduk kabupaten Pesisir Selatan memiliki karakteristik tersendiri dalam memilih pekerjaan sebagai sumber pendapatannya yaitu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu dan tidak banyak bergantung pada orang lain dan menunjukkan bahwa masyarakat kabupaten Pesisir Selatan masih menjadi bagian dari masyarakat agraris. Pemerintah daerah masih perlu meletakkan kebijakan pembangunan dibidang pertanian/peternakan sebagai kelompok prioritas pembangunan utama.



Grafik 9. Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan



3. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.

Tabel 10. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga

NO	STAT HBKEL	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2 + PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	KEPALA KELUARGA	120,570	23.70	27,514	5.41	148,084	29.11
2	IS TRI	0	0.00	109,797	21.58	109,797	21.58
3	ANAK	125,386	24.65	102,051	20.06	227,437	44.71
4	MENANTU	71	0.01	22	0.00	93	0.02
5	CUCU	2,626	0.52	2,121	0.42	4,747	0.93
6	ORANGTUA	151	0.03	1,281	0.25	1,432	0.28
7	MERTUA	366	0.07	3,617	0.71	3,983	0.78
8	FAMILI LAIN	4,457	0.88	2,823	0.55	7,280	1.43
9	PEMBANTU	8	0.00	10	0.00	18	0.00
10	LAINNYA	3,405	0.67	2,415	0.47	5,820	1.14
TOTAL PESISIR SELATAN		257,040	50.53	251,651	49.47	508,691	100.00

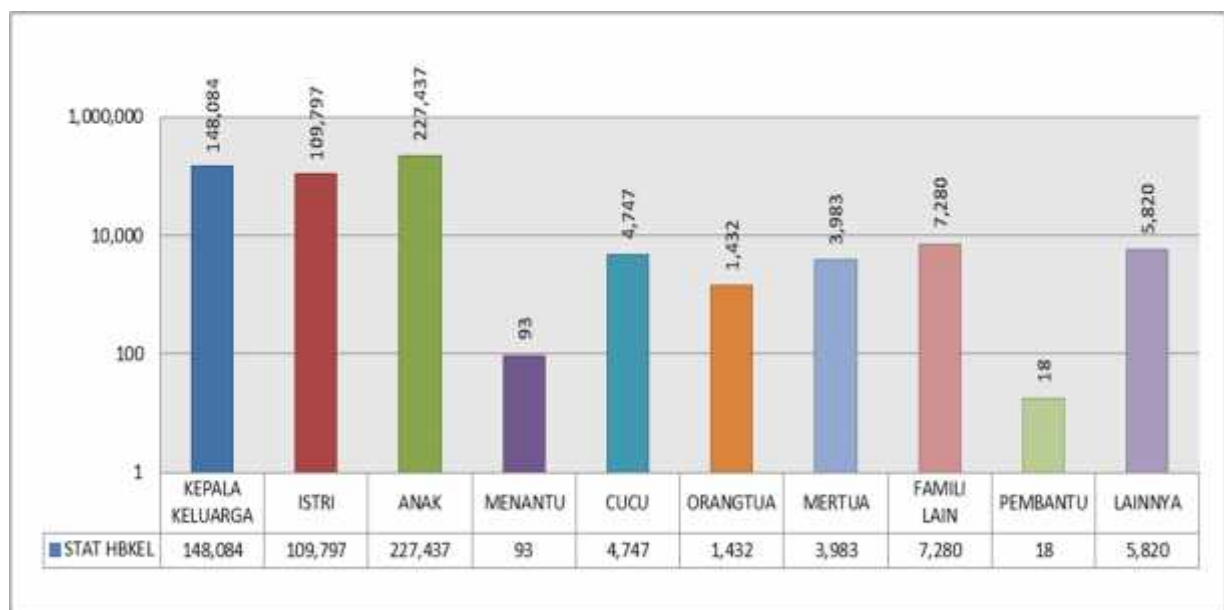
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018



Dari Tabel 10. di atas, nampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri, yaitu dari 148.084 jiwa kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki sebesar 120,570 jiwa (23,7%), yang berstatus memiliki isteri sebanyak 109.797 jiwa dan selebihnya sebesar 10.773 jiwa berstatus lajang.

Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan sebesar 27.514 jiwa (5,41%). Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup atau cerai mati. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga dengan kepala keluarga laki-laki.

Grafik 10. Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga



Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua, famili lain, pembantu dan lainnya menunjukkan proporsi yang rendah. Ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kabupaten Pesisir Selatan jumlahnya tidak besar. Namun demikian, perlu diperhatikan adalah keluarga luas yang dikepalai oleh perempuan, jumlahnya lebih besar dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki.



4. Penduduk Menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Tabel 11. Penduduk Menurut Status Perkawinan

NO	KECAMATAN	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		JUMLAH	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	PANCUNG SOAL	6,354	1.7	10,990	2.9	271	0.1	734	0.2	18,349	4.9
2	RANAH PESISIR	8,664	2.3	16,227	4.3	517	0.1	1,422	0.4	26,830	7.1
3	LENGAYANG	16,092	4.3	28,762	7.7	969	0.3	2,466	0.7	48,289	12.9
4	BATANG KAPAS	9,455	2.5	16,359	4.4	460	0.1	1,665	0.4	27,939	7.4
5	IV JURAI	11,399	3.0	23,648	6.3	644	0.2	2,027	0.5	37,718	10.0
6	BAYANG	10,490	2.8	19,113	5.1	669	0.2	2,078	0.6	32,350	8.6
7	KOTO XI TARUSAN	14,518	3.9	22,862	6.1	743	0.2	2,259	0.6	40,382	10.8
8	SUTERA	12,843	3.4	24,706	6.6	772	0.2	2,018	0.5	40,339	10.7
9	LINGGO SARI BAGANTI	11,719	3.1	22,637	6.0	672	0.2	1,471	0.4	36,499	9.7
10	LUNANG	4,262	1.1	10,440	2.8	197	0.1	500	0.1	15,399	4.1
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,475	0.9	7,058	1.9	176	0.0	531	0.1	11,240	3.0
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2,257	0.6	3,815	1.0	127	0.0	532	0.1	6,731	1.8
13	AIRPURA	3,910	1.0	7,663	2.0	224	0.1	429	0.1	12,226	3.3
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,327	0.9	6,630	1.8	175	0.0	451	0.1	10,583	2.8
15	SILAUT	2,538	0.7	7,764	2.1	85	0.0	280	0.1	10,667	2.8
TOTAL PESISIR SELATAN		121,303	32.3	228,674	60.9	6,701	1.8	18,863	5.0	375,541	100.0

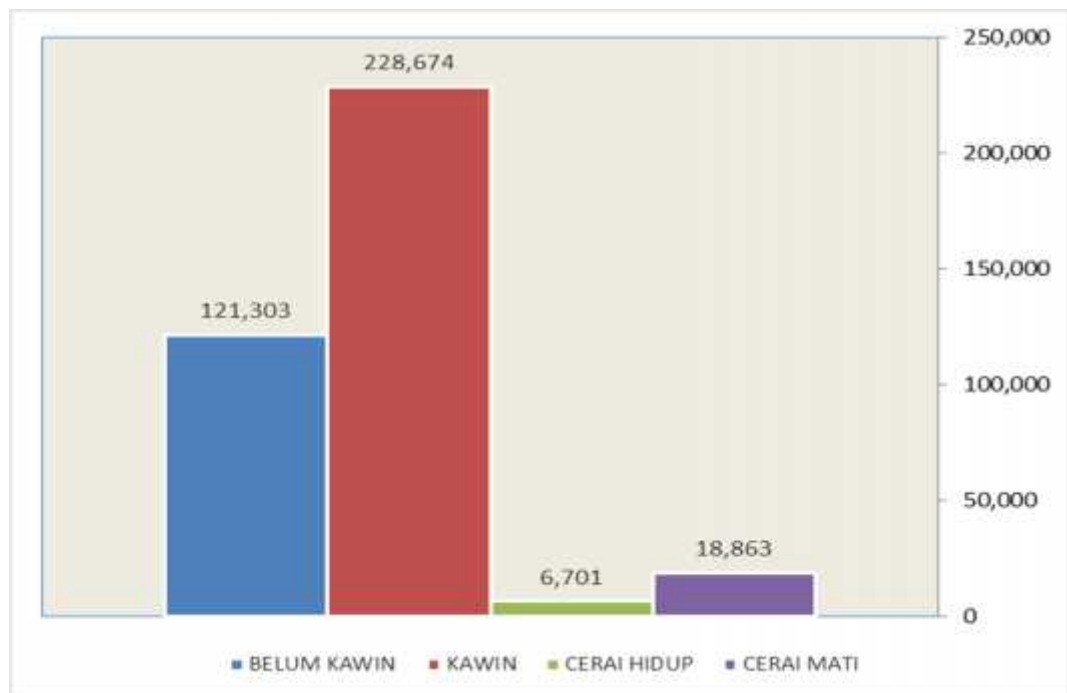
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

Tabel 11. menyajikan komposisi penduduk menurut status kawin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 10 tahun ke atas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 60,9%. Hal ini nampak jelas baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin hampir sama dengan perempuan. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena biasanya laki-laki masih meneruskan pendidikan atau baru mulai bekerja, sehingga menunda perkawinan.



Begitu juga laki-laki yang dikonstruksikan sebagai kepala keluarga yang harus membiayai kebutuhan keluarga, mempunyai keinginan mapan secara ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Grafik 11. Penduduk Menurut Status Perkawinan



Proporsi penduduk dengan status cerai hidup (1,8%) dan cerai mati (5%), lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal disebabkan meninggal istrinya lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi.

Menarik untuk diperhatikan pada penduduk berstatus cerai hidup (1,8%), bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

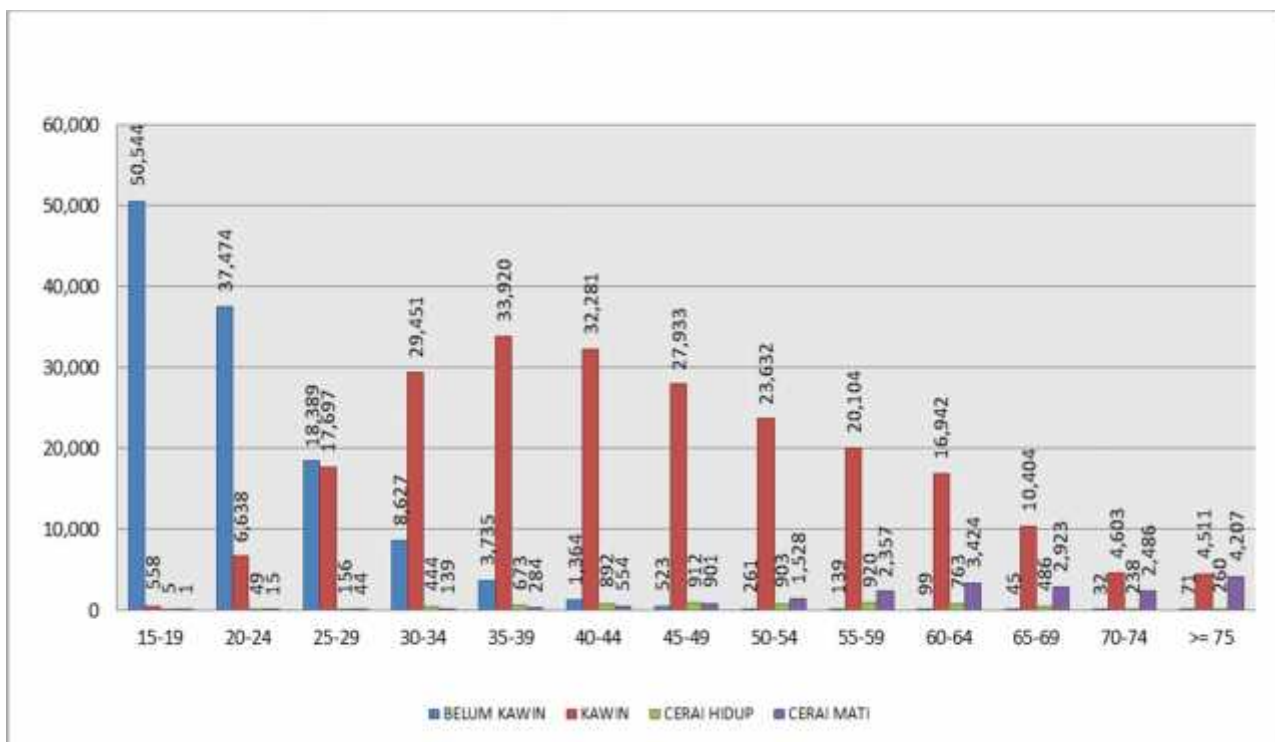


Tabel 12. Penduduk Menurut Status Perkawinan dan Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		JML	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	15-19	50,544	13.5	558	0.1	5	0.0	1	0.0	51,108	13.6
2	20-24	37,474	10.0	6,638	1.8	49	0.0	15	0.0	44,176	11.8
3	25-29	18,389	4.9	17,697	4.7	156	0.0	44	0.0	36,286	9.7
4	30-34	8,627	2.3	29,451	7.8	444	0.1	139	0.0	38,661	10.3
5	35-39	3,735	1.0	33,920	9.0	673	0.2	284	0.1	38,612	10.3
6	40-44	1,364	0.4	32,281	8.6	892	0.2	554	0.1	35,091	9.3
7	45-49	523	0.1	27,933	7.4	912	0.2	901	0.2	30,269	8.1
8	50-54	261	0.1	23,632	6.3	903	0.2	1,528	0.4	26,324	7.0
9	55-59	139	0.0	20,104	5.4	920	0.2	2,357	0.6	23,520	6.3
10	60-64	99	0.0	16,942	4.5	763	0.2	3,424	0.9	21,228	5.7
11	65-69	45	0.0	10,404	2.8	486	0.1	2,923	0.8	13,858	3.7
12	70-74	32	0.0	4,603	1.2	238	0.1	2,486	0.7	7,359	2.0
13	>= 75	71	0.0	4,511	1.2	260	0.1	4,207	1.1	9,049	2.4
TOTAL PESISIR SELATAN		121,303	32.3	228,674	60.9	6,701	1.8	18,863	5.0	375,541	100.0

Sumber: Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

Grafik 12. Penduduk Menurut Status Kawin dan Kelompok Umur





Jika dikaitkan dengan umur nampak bahwa proporsi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 15-24 tahun cukup tinggi, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi pada kelompok umur 35-39 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah ditambah dengan mereka yang berstatus bekerja.

Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih banyak berada pada umur 55-59 tahun, sementara penduduk yang berstatus cerai mati lebih banyak berada pada kelompok umur di atasnya yakni ≥ 75 tahun ke atas. Penduduk berumur muda yang cerai hidup biasanya segera melakukan perkawinan kembali sehingga proporsi mereka lebih rendah dibandingkan dengan penduduk yang berstatus cerai mati.

Penduduk usia remaja (15-19 Tahun) yang sudah berstatus kawin yang jumlahnya cukup tinggi yakni 558 orang dan berstatus cerai mati sebesar 1 orang. Hal ini memerlukan perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkaitan masalah kehamilan, persalinan dan paska melahirkan (kesehatan reproduksi) dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

5. Penduduk menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya memeluk agama Islam (99,81%), disusul kemudian pemeluk agama Kristen (0,15%), agama Katholik (0,04%), agama Hindu, agama Budha (0%).



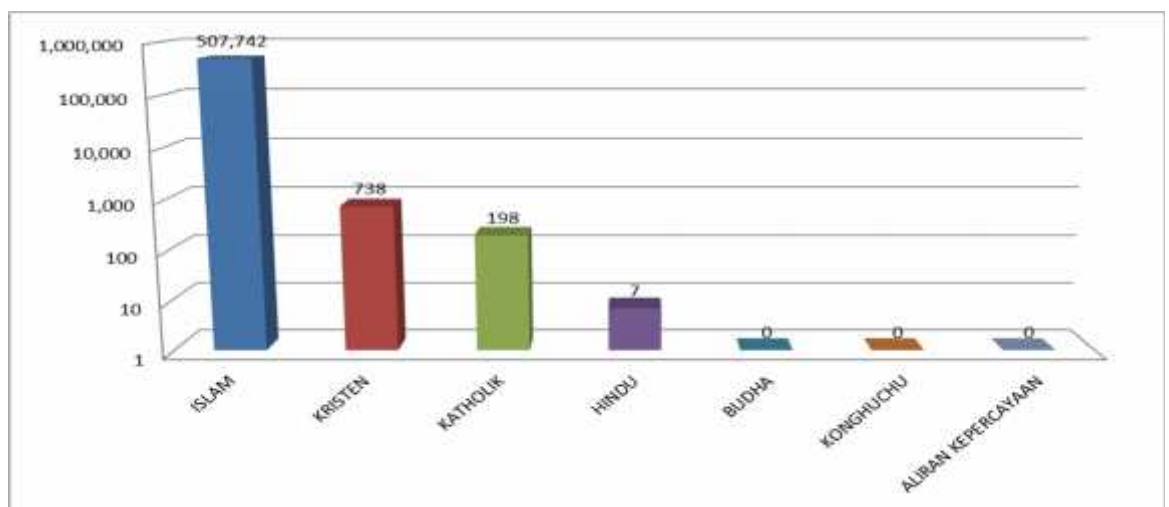
Tabel 13. Penduduk Menurut Agama

NO	AGAMA	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2 + PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	ISLAM	256,549	50.43	251,193	49.38	507,742	99.81
2	KRISTEN	393	0.08	349	0.07	742	0.15
3	KATHOLIK	93	0.02	107	0.02	200	0.04
4	HINDU	5	0.00	2	0.00	7	0.00
5	BUDHA	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	KONGHUCHU	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ALIRAN KEPERCAYAAN	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL PESISIR SELATAN		257,040	50.53	251,651	49.47	508,691	100.00

Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk, maka penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan yang didominasi oleh pemeluk Agama Islam sebesar 507.742 jiwa (99.81%), terlihat penduduk laki-laki lebih banyak sebesar 256.549 jiwa (50.43%) dan penduduk perempuan sebesar 251.193 jiwa (49.38%), Agama Kristen sebesar 742 jiwa (0.15%) dengan penduduk laki-laki 393 jiwa (0.08%) dan penduduk perempuan sebesar 349 jiwa (0.07%), Agama Katholik sebesar 200 jiwa (0.04%) dengan penduduk perempuan lebih banyak sebesar 107 jiwa (0.02%) sedangkan penduduk laki-laki sebesar 93 jiwa (0.02%), Agama Hindu sebesar 7 jiwa dimana penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan yang beragama hindu sebesar 5 jiwa laki-laki dan 2 orang perempuan.

Grafik 13. Penduduk Menurut Agama





6. Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

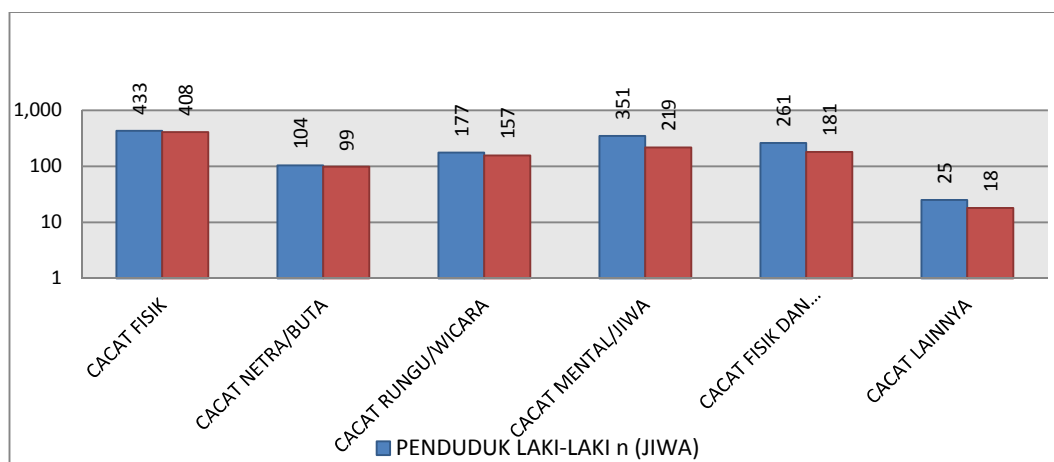
Data kecacatan sangat diperlukan dalam membuat perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus seperti penyandang kecacatan atau penyandang disabilitas (cacat fisik, cacat netra, cacat rungu, cacat mental, cacat fisik dan mental dan cacat lainnya)

Tabel 14. Penduduk Menurut Jenis Kecacatan

NO	JENIS KECACATAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2+PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	CACAT FISIK	433	17.8	408	16.8	841	34.6
2	CACAT NETRA/BUTA	104	4.3	99	4.1	203	8.3
3	CACAT RUNGU/WICARA	177	7.3	157	6.5	334	13.7
4	CACAT MENTAL/JIWA	351	14.4	219	9.0	570	23.4
5	CACAT FISIK DAN MENTAL	261	10.7	181	7.4	442	18.2
6	CACAT LAINNYA	25	1.0	18	0.7	43	1.8
TOTAL PESISIR SELATAN		1,351	55.5	1,082	44.5	2,433	100.0
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							

Dari Table 14. di atas, tersaji data penduduk penyandang cacat yang tercatat di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 2.433 jiwa dengan jenis kecacatan yang paling banyak adalah cacat fisik yaitu sebanyak 841 jiwa (34,6%) dengan penduduk laki-laki sebanyak 433 jiwa (17,8%) dan penduduk perempuan sebanyak 408 jiwa (16,8%).

Grafik 14. Penduduk Menurut Jenis Kecacatan





D. Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1. Rata-Rata Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.



Tabel 15. Rata-rata Anggota Keluarga

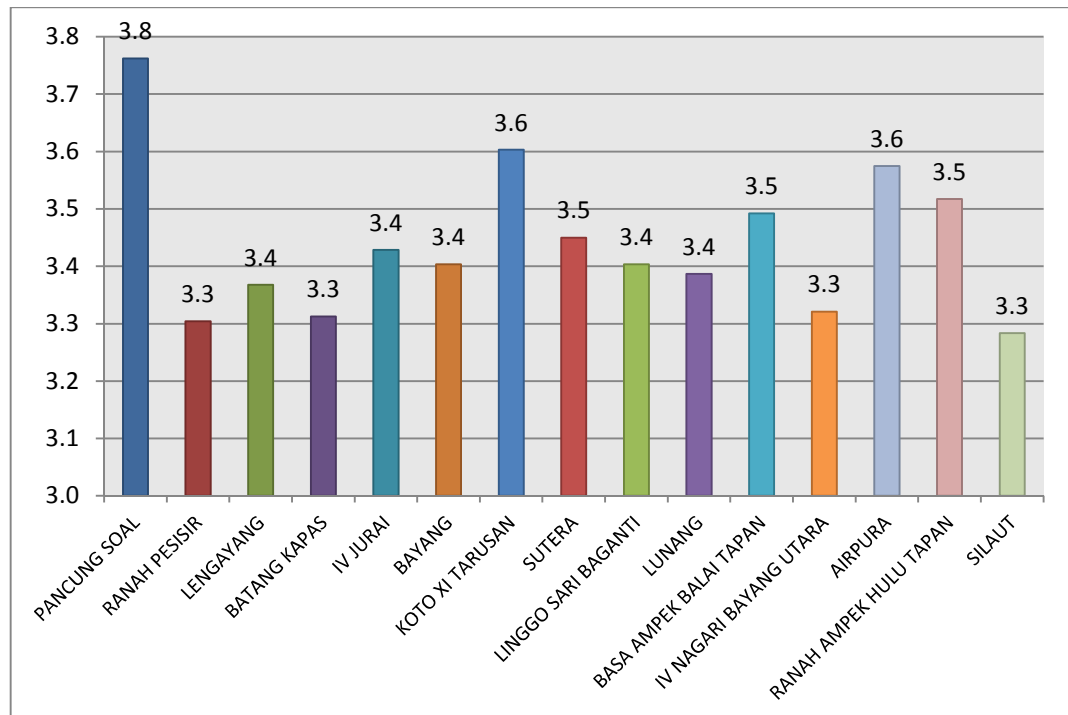
NO	KECAMATAN	KELUARGA		RATA2 ANGGOTA KELUARGA
		n (KK)	(%)	
1	PANCUNG SOAL	6,912	4.7	3.8
2	RANAH PESISIR	10,576	7.1	3.3
3	LENGAYANG	18,840	12.7	3.4
4	BATANG KAPAS	11,360	7.7	3.3
5	IV JURAI	14,875	10.0	3.4
6	BAYANG	12,715	8.6	3.4
7	KOTO XI TARUSAN	15,011	10.1	3.6
8	SUTERA	16,215	10.9	3.5
9	LINGGO SARI BAGANTI	14,565	9.8	3.4
10	LUNANG	6,308	4.3	3.4
11	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4,503	3.0	3.5
12	IV NAGARI BAYANG UTARA	2,656	1.8	3.3
13	AIRPURA	4,859	3.3	3.6
14	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,200	2.8	3.5
15	SILAUT	4,489	3.0	3.3
TOTAL PESISIR SELATAN		148,084	100.0	3.4

Sumber: Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

Jumlah keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 148.084 keluarga yang tersebar di 15 kecamatan. Kecamatan Lengayang memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 18.840 keluarga (12,7%), kemudian disusul oleh Kecamatan Sutera sebanyak 16.215 keluarga (10,9%), Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 15.011 keluarga (10,1%), Kecamatan IV Jurai sebanyak 14.875 keluarga (10,0%), Kecamatan Linggo Sari Baganti sebanyak 14.565 keluarga (9,8%), Kecamatan Bayang sebanyak 12.715 keluarga (8,6%), Kecamatan Batang Kapas sebanyak 11.360 keluarga (7,7%), Kecamatan Ranah Pesisir sebanyak 10.576 keluarga (7,1%), Kecamatan Pancung Soal sebanyak 6.912 keluarga (4,7%), Kecamatan Lunang sebanyak 6.308 keluarga (4,3%), Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebanyak 4.503 keluarga (3,0%), Kecamatan Silaut 4.489 (3,0%), Kecamatan Airpura sebanyak 4.859 keluarga (3,3%), Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebanyak 4.200 keluarga (2,8%). Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu 2.656 keluarga (1,8%)



Grafik 15. Rata-rata Anggota Keluarga



Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 3,4 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang sampai dengan 4 orang. Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan dapat digunakan pemerintah daerah dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

2. Karakteristik Kepala Keluarga

Kepala keluarga seorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah ataupun tidak yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara ekonomi, sosial dan psikologi.

Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan dan status perkawinan penting untuk diketahui, berkaitan dengan

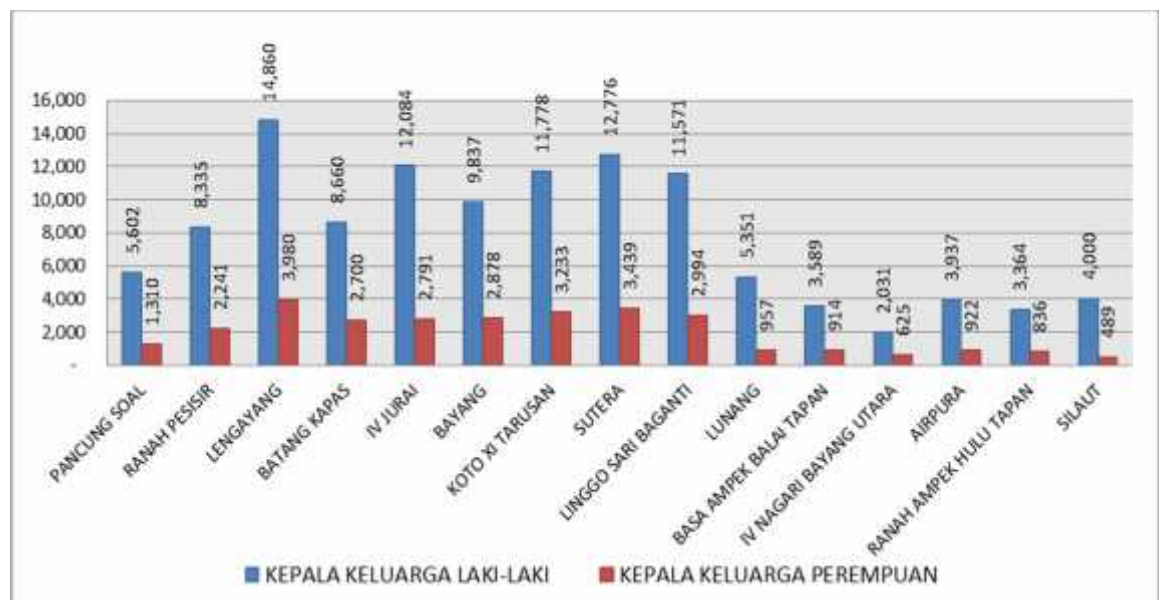


perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasis keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 16. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

KODE KEC	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2 + PR	
		n (Jiwa)	(%)	n (Jiwa)	(%)	n (Jiwa)	(%)
130101	PANCUNG SOAL	5,602	3,8	1,310	0,9	6,912	4,7
130102	RANAH PESISIR	8,335	5,6	2,241	1,5	10,576	7,1
130103	LENGAYANG	14,860	10,0	3,980	2,7	18,840	12,7
130104	BATANG KAPAS	8,660	5,8	2,700	1,8	11,360	7,7
130105	IV LURAI	12,084	8,2	2,791	1,9	14,875	10,0
130106	BAYANG	9,837	6,6	2,878	1,9	12,715	8,6
130107	KOTO XI TARUSAN	11,778	8,0	3,233	2,2	15,011	10,1
130108	SUTERA	12,776	8,6	3,439	2,3	16,215	10,9
130109	LINGGO SARI BAGANTI	11,571	7,8	2,994	2,0	14,565	9,8
130110	LUNANG	5,351	3,6	957	0,6	6,308	4,3
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	3,589	2,4	914	0,6	4,503	3,0
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	2,031	1,4	625	0,4	2,656	1,8
130113	AIR PURA	3,937	2,7	922	0,6	4,859	3,3
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,364	2,3	836	0,6	4,200	2,8
130115	SILAUT	4,000	2,7	489	0,3	4,489	3,0
TOTAL PESISIR SELATAN		117,775	79,5	30,309	20,5	148,084	100,0
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							

Grafik 16. Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin



Tabel 16 dan Grafik 16 Menyajikan Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan menurut Jenis Kelamin. Dari tabel tersebut terlihat



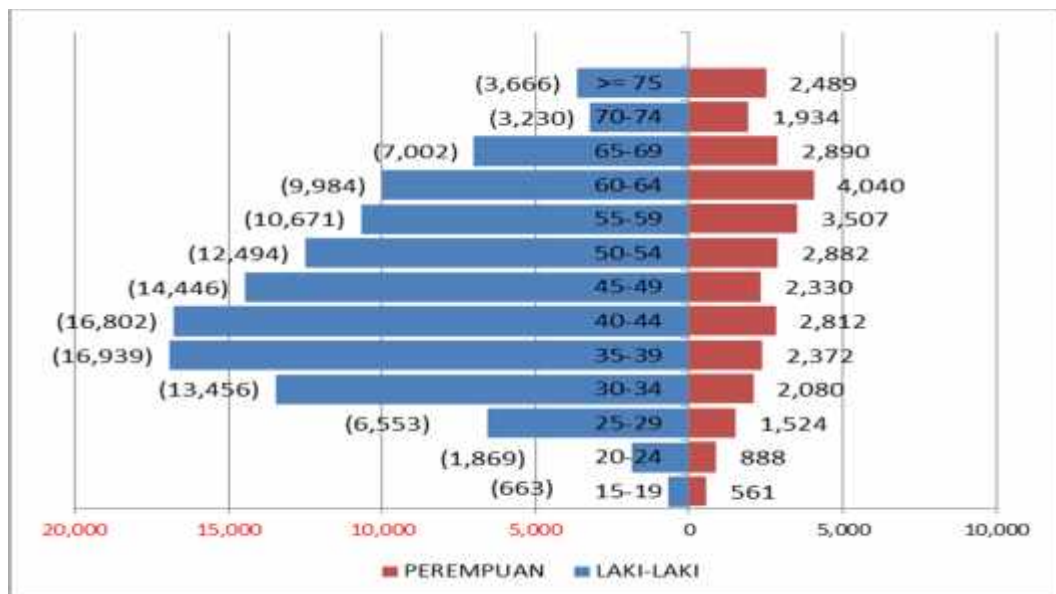
bahwa mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan adalah laki-laki yaitu 117,775 jiwa (79,5%), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 30.309 jiwa (20.5%), dengan perbandingannya sekitar 4:1, yang artinya dari 4 kepala keluarga laki-laki terdapat 1 kepala keluarga perempuan.

Tabel 17. Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2 + PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
2	15-19	663	0.4	561	0.4	1,224	0.8
3	20-24	1,869	1.3	888	0.6	2,757	1.9
4	25-29	6,553	4.4	1,524	1.0	8,077	5.5
5	30-34	13,456	9.1	2,080	1.4	15,536	10.5
6	35-39	16,939	11.4	2,372	1.6	19,311	13.0
7	40-44	16,802	11.3	2,812	1.9	19,614	13.2
8	45-49	14,446	9.8	2,330	1.6	16,776	11.3
9	50-54	12,494	8.4	2,882	1.9	15,376	10.4
10	55-59	10,671	7.2	3,507	2.4	14,178	9.6
11	60-64	9,984	6.7	4,040	2.7	14,024	9.5
12	65-69	7,002	4.7	2,890	2.0	9,892	6.7
13	70-74	3,230	2.2	1,934	1.3	5,164	3.5
14	>= 75	3,666	2.5	2,489	1.7	6,155	4.2
TOTAL PESISIR SELATAN		117,775	79.5	30,309	20.5	148,084	100.0

Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

Grafik 17. Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur





Tabel 17 dan Grafik 17 memperlihatkan bahwa mayoritas keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan dikepalai oleh kepala keluarga yang berumur antara 30-64 tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan keluarga yang berada pada kelompok produktif dan yang menarik adalah adanya kepala keluarga pada kelompok umur di bawah 15 tahun yaitu 0,1 persen, walaupun persentasenya kecil namun perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan wajib belajar bagi anak usia sekolah.

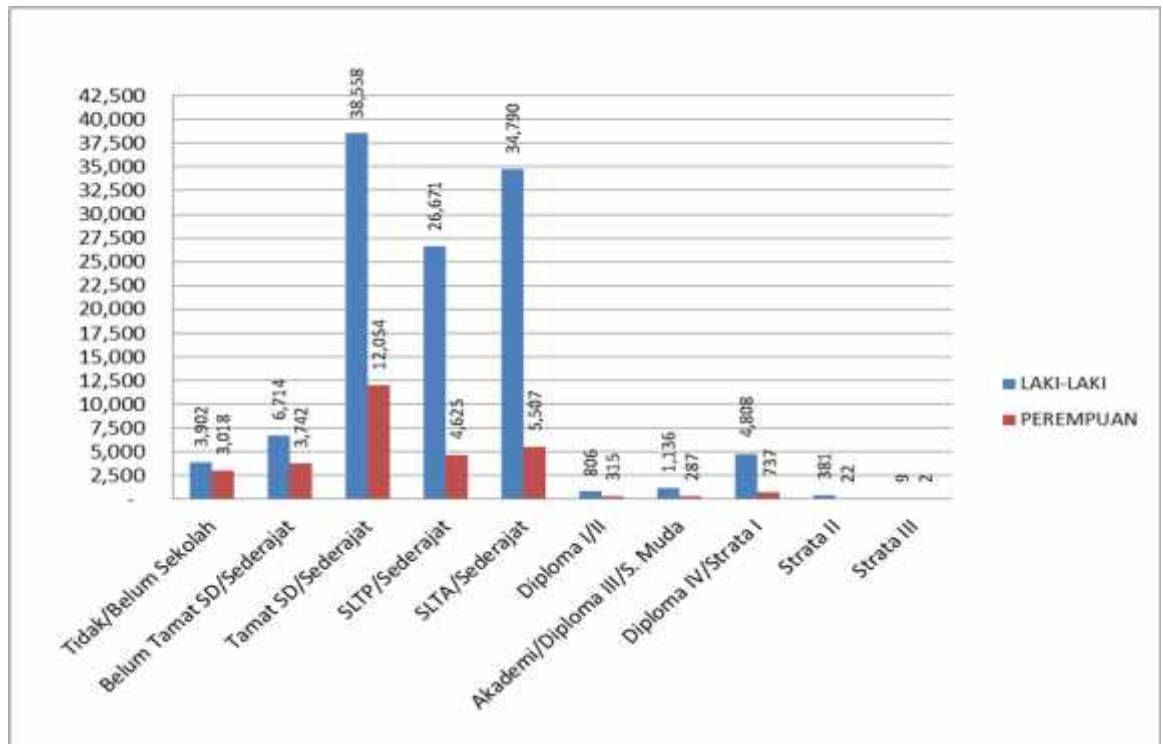
Tabel 18. Kepala Keluarga Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KEPALA KELUARGA					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2 + PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	3,902	2.6	3,018	2.0	6,920	4.7
2	Belum Tamat SD/Sederajat	6,714	4.5	3,742	2.5	10,456	7.1
3	Tamat SD/Sederajat	38,558	26.0	12,054	8.1	50,612	34.2
4	SLTP/Sederajat	26,671	18.0	4,625	3.1	31,296	21.1
5	SLTA/Sederajat	34,790	23.5	5,507	3.7	40,297	27.2
6	Diploma I/II	806	0.5	315	0.2	1,121	0.8
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	1,136	0.8	287	0.2	1,423	1.0
8	Diploma IV/Strata I	4,808	3.2	737	0.5	5,545	3.7
9	Strata II	381	0.3	22	0.0	403	0.3
10	Strata III	9	0.0	2	0.0	11	0.0
TOTAL PESISIR SELATAN		117,775	79.5	30,309	20.5	148,084	100.0
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							

Dari Tabel 18 terlihat bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 50.612 jiwa (34,2%), disusul dengan tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 40.297 jiwa (27,2%), SLTP/Sederajat sebanyak 31.296 jiwa (21,1%), belum tamat SD/ sederajat sebanyak 10.456 jiwa (7,1%), tidak/belum sekolah sebanyak 6.920 jiwa (4,7%), tamat Diploma IV/S1 sebanyak 5.545 jiwa (3,7%), tamat Diploma III sebanyak 1.423 jiwa (1,0%), tamat diploma I/II sebanyak 1.121 jiwa (0,8%), tamat Strata II sebanyak 403 jiwa (0,3%) dan Strata III sebanyak 11 jiwa (0,0%).



Grafik 18. Kepala Keluarga Menurut Pendidikan



Dunia globalisasi yang sedang berlangsung, bonus demografi yang tersedia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan agar mempunyai daya saing global, sehingga dapat memanfaatkan bonus demografi yang akan segera berlangsung. Hal ini tentu harus memperoleh perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewajibkan anak didiknya belajar sembilan tahun, itu artinya Kepala Keluarga minimal harus tamat SLTP/ sederajat.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan ini, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.



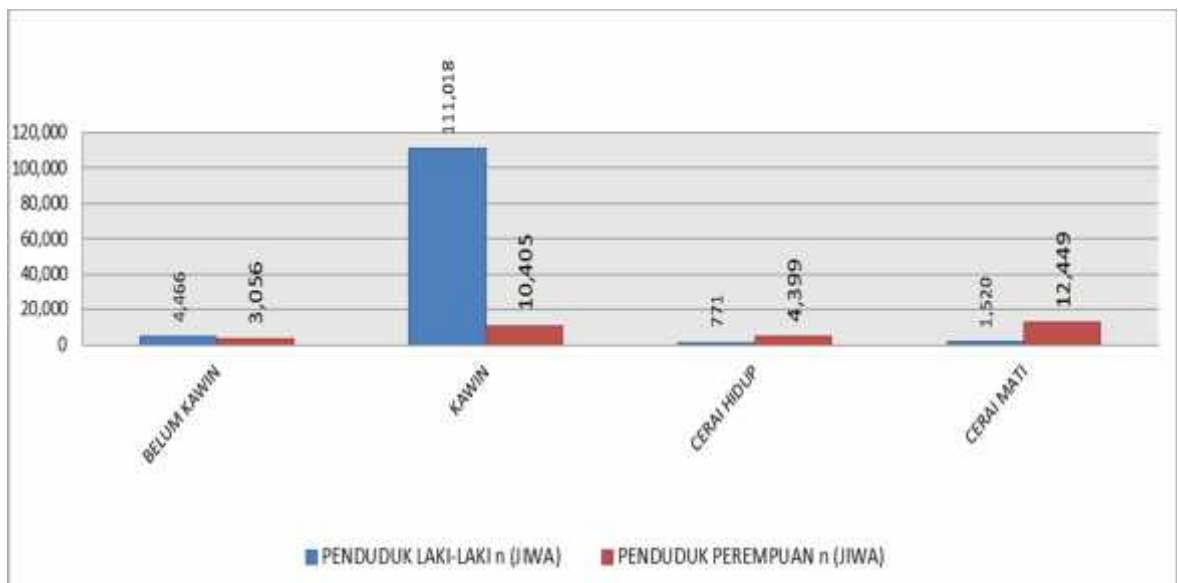
Jika dikaitkan dengan jenis kelamin, nampak bahwa banyak kepala keluarga perempuan yang tidak bersekolah, belum tamat SD, dan tamat SD lebih tinggi dibandingkan dengan kepala keluarga laki-laki, maka dugaan keluarga yang dikepalai perempuan akan mempunyai status ekonomi yang lebih rendah dibandingkan yang dikepalai laki-laki mendekati kenyataan.

Tabel 19. Kepala Keluarga Menurut Status Kawin

NO	JENIS KEKACATAN	PENDUDUK					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK2+PR	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
1	BELUM KAWIN	4,466	3.0	3,056	2.1	7,522	5.1
2	KAWIN	111,018	75.0	10,405	7.0	121,423	82.0
3	CERAI HIDUP	771	0.5	4,399	3.0	5,170	3.5
4	CERAI MATI	1,520	1.0	12,449	8.4	13,969	9.4
TOTAL PESISIR SELATAN		117,775	79.5	30,309	20.5	148,084	100.0

Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

Graik 19. Kepala Keluarga Menurut Status Kawin



Kepala keluarga menurut status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah kepala keluarga yang dikepalai oleh seorang penduduk berstatus kawin, belum kawin, cerai hidup atau cerai mati.



Tabel 19 dan Grafik 19 di atas menunjukkan bahwa keluarga-keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan didominasi kepala keluarga dikepalai oleh penduduk berstatus kawin yaitu sebanyak 121.423 jiwa (82,0%). Kepala keluarga yang berstatus belum kawin sebanyak 7.522 jiwa (5,2%). Untuk kepala keluarga yang berstatus belum kawin ini perlu dilihat lagi apakah memiliki anggota keluarga atau hidup sendirian tanpa anggota keluarga.

Kepala keluarga berstatus cerai hidup sebanyak 5.170 jiwa (3,5%) dan berstatus cerai mati sebanyak 13.969 jiwa (9,4%), masih didominasi oleh penduduk perempuan yang masing-masing untuk cerai hidup sebanyak 4.399 jiwa dan cerai mati 12.449 jiwa. Kebiasaan kawin kembali yang cepat dilakukan oleh penduduk laki-laki menyebabkan perbedaan angka tersebut. Penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup atau cerai mati mempunyai banyak pertimbangan sehingga tidak ingin lagi untuk kawin dan bersuami kembali, apalagi mereka telah memiliki anak-anak yang secara budaya lokal menjadi tanggung jawab perempuan.



BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

Kualitas pembangunan manusia diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan (*melek huruf dan rata-rata lama sekolah*), kesehatan (*angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir*) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan per kapita.

A. Kelahiran

1. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

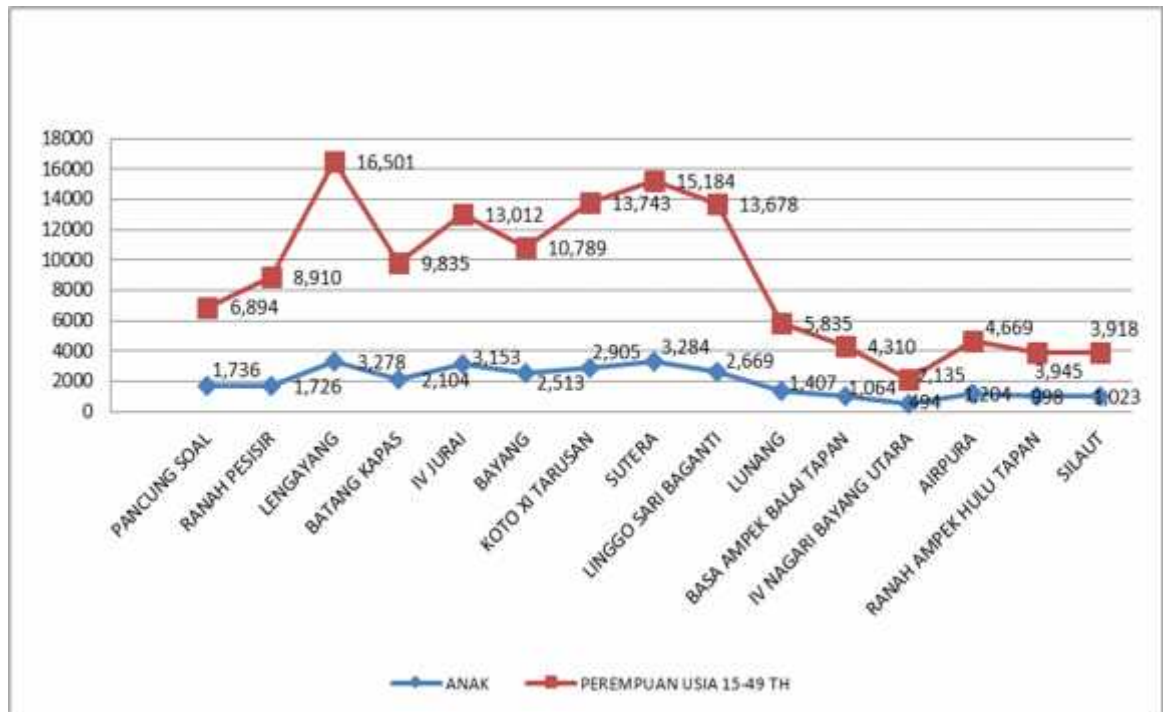
Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anak di usia 0-5 tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) di suatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

Tabel 20. Rasio Anak Balita Terhadap Penduduk Perempuan Usia 15 - 49 Tahun

KODE KEC	KECAMATAN	ANAK	PEREMPUAN USIA 15-49 TH	CWR
130101	PANCUNG SOAL	1,736	6,894	25.2
130102	RANAH PESISIR	1,726	8,910	19.4
130103	LENGAYANG	3,278	16,501	19.9
130104	BATANG KAPAS	2,104	9,835	21.4
130105	IV JURAI	3,153	13,012	24.2
130106	BAYANG	2,513	10,789	23.3
130107	KOTO XI TARUSAN	2,905	13,743	21.1
130108	SUTERA	3,284	15,184	21.6
130109	LINGGO SARI BAGANTI	2,669	13,678	19.5
130110	LUNANG	1,407	5,835	24.1
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	1,064	4,310	24.7
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	494	2,135	23.1
130113	AIRPURA	1,204	4,669	25.8
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	998	3,945	25.3
130115	SILAUT	1,023	3,918	26.1
TOTAL PESISIR SELATAN		29,558	133,358	22.2
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018				



Grafik 20. Rasio Anak Balita Terhadap Penduduk Perempuan Usia 15 - 49 Th



Pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2018, besarnya rasio anak dan perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 22,2 CWR. Hal ini berarti bahwa diantara 100 perempuan usia produktif terdapat 22 jiwa balita umur 0-5 tahun. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup rendah karena masih kecilnya jumlah anak balita. CWR tertinggi di Kecamatan Silaut sebesar 26,1 CWR, sedangkan CWR terendah di Kecamatan Ranah Pesisir yaitu sebesar 19,4 CWR, Kecamatan Lingo Sari Baganti yaitu sebesar 19,5 CWR dan Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 19,9 CWR.

B. Ekonomi

1. Angkatan Kerja dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun (*Tenaga Kerja/ manpower*), tidak termasuk di dalamnya penduduk yang sedang sekolah, pensiunan, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Angkatan Kerja



dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (*employed*) dan mencari pekerjaan/menganggur (*unemployed*).

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan dari penduduk usia kerja (15-64 tahun). Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kabupaten Pesisir Selatan pada Semester 2 Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 21. Penduduk Menurut Angka Partisipasi Kerja

NO	KELOMPOK UMUR	TENAGA KERJA	ANGKATAN KERJA			BUKAN ANGKATAN KERJA	ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
			TIDAK BEKERJA	BEKERJA	JUMLAH		
1	15-19	51,108	7,749	348	8,097	43,011	15.8
2	20-24	44,176	8,612	4,184	12,796	31,380	29.0
3	25-29	36,286	6,413	12,808	19,221	17,065	53.0
4	30-34	38,661	3,539	20,171	23,710	14,951	61.3
5	35-39	38,612	1,453	20,954	22,407	16,205	58.0
6	40-44	35,091	585	19,167	19,752	15,339	56.3
7	45-49	30,269	307	17,058	17,365	12,904	57.4
8	50-54	26,324	282	15,144	15,426	10,898	58.6
9	55-59	23,520	244	12,800	13,044	10,476	55.5
10	60-64	18,137	315	9,748	10,063	8,074	55.5
		342,184	29,499	132,382	161,881	180,303	47.3

Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

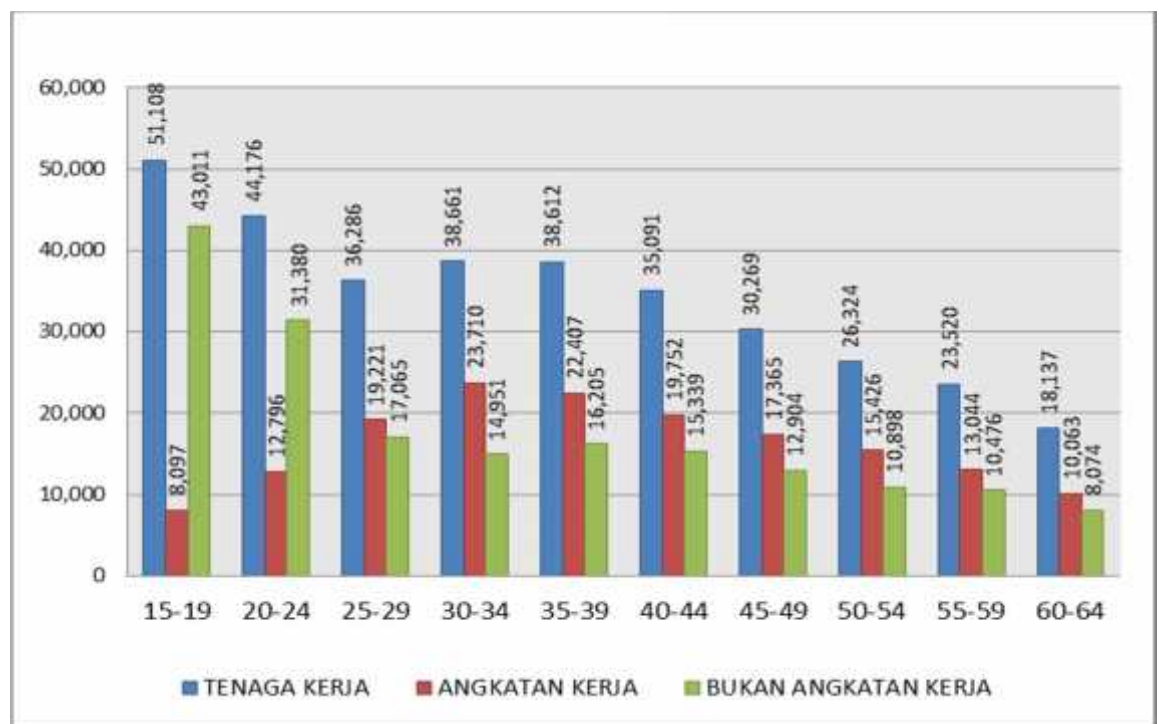
Dari Tabel. 20. terlihat bahwa jumlah tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 342.184 jiwa (15-64 tahun) dan jumlah angkatan kerja sebesar 161.881 jiwa. Angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 23.710 jiwa, diikuti kelompok umur 35-39 tahun sebesar 22.407 jiwa dan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu sebesar 8.097 jiwa. Terlihat juga bahwa 47,3%% dari angka tenaga kerja di Kabupaten Pesisir Selatan telah berpartisipasi dalam pasar kerja, yang dapat diartikan 47,3% penduduk usia kerja (15-64 tahun) terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha produktif. Semakin tinggi Angka Partisipasi Angkatan



Kerja (APAK) berarti semakin banyak penduduk Angkatan Kerja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha produktif. APAK Kabupaten Pesisir Selatan tertinggi ada pada kelompok umur 30-34 tahun yaitu 61,3%.

Pemerintah daerah perlu perhatian terhadap sebanyak 8.097 jiwa penduduk angkatan kerja berusia muda yaitu 15-19 tahun. Kelompok ini seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Mereka terpaksa berhenti sekolah dan masuk ke pasar kerja. Jika kelompok ini tidak memperoleh perhatian, maka mereka akan menjadi tenaga kerja yang rendah kualitasnya sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka.

Grafik 21. Penduduk Menurut Angka Partisipasi Kerja





BAB V

MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk mempunyai pengertian pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap seperti mobilitas ulang alik (komunitas) dan migrasi. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain atau suatu daerah ke daerah lain.

Pertumbuhan penduduk alamiah sudah bisa diturunkan dengan pengendalian kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk mulai memperoleh perhatian. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai masalah yang akhir-akhir ini terjadi seperti terorisme, konflik sosial, konflik antar suku yang semua disebabkan oleh mobilitas penduduk yang semakin meningkat. Selama ini belum memperoleh perhatian dari pemerintah. Padahal mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan.

Mobilitas penduduk ada dua tipe yaitu mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi dan mobilitas non permanen. Mobilitas penduduk permanen di Indonesia sudah banyak diteliti dan dianalisis oleh berbagai ahli kependudukan, sedangkan penelitian mobilitas non permanen secara makro belum banyak dilakukan karena keterbatasan data yang ada. Kedua tipe ini berpengaruh positif maupun negatif di daerah asal maupun di daerah tujuan. Oleh sebab itu pengarahan mobilitas perlu dilakukan agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial.



1. Mobilitas Permanen (Migrasi)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Atau dengan kata lain, migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tempat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya.

2. Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar

Migrasi penduduk keluar Kabupaten Pesisir Selatan (pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah datang pada tahun 2018 adalah 9.008 jiwa yang berasal dari 2.605 jiwa pindah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dan 6.403 jiwa pindah ke luar Provinsi Sumatera Barat. Jika diperhatikan menurut kecamatan maka penduduk keluar terbesar berasal dari Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu 1.411 jiwa yang terdiri dari 464 jiwa pindah ke luar Kabupaten Pesisir Selatan ke daerah dalam Provinsi Sumatera Barat sedangkan 947 jiwa keluar Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan yang paling sedikit penduduk pindah yaitu sebanyak 163 jiwa yang terdiri dari 33 jiwa pindah ke kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat dan 130 jiwa keluar Provinsi Sumatera Barat.

Sementara penduduk datang menurut kecamatan maka penduduk datang terbesar di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu 4.376 jiwa yang berasal dari 1.726 jiwa

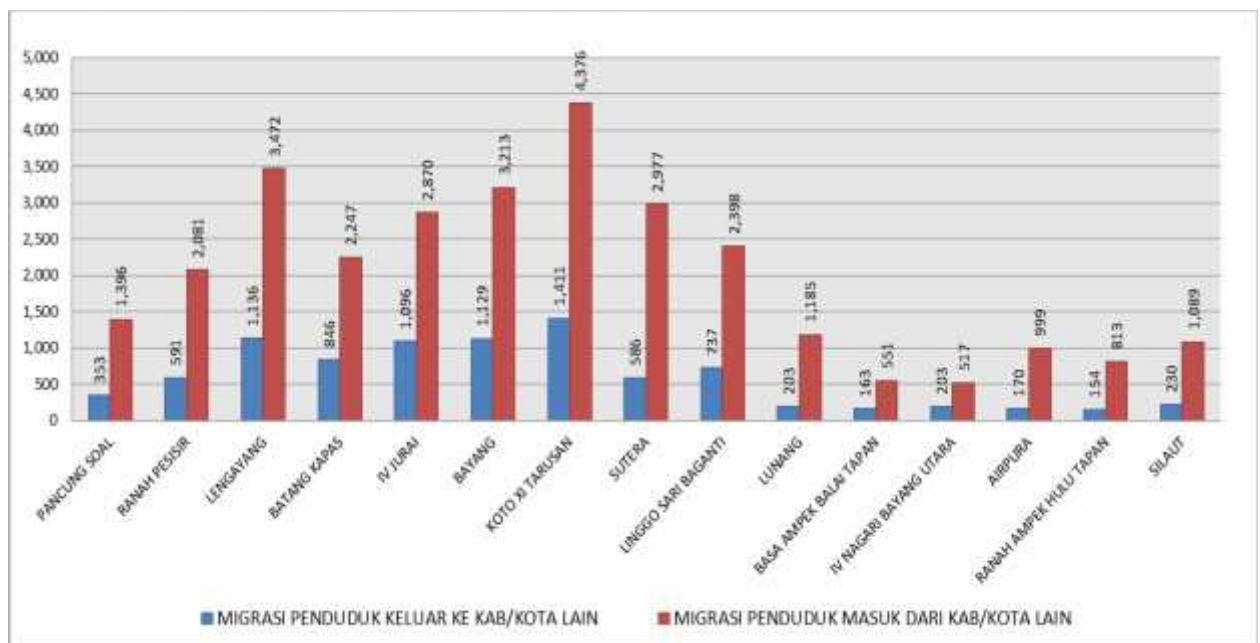


penduduk datang dari Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat dan 2.650 jiwa penduduk datang dari luar Propinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang paling sedikit penduduk datang ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sebanyak 517 jiwa yang terdiri dari 66 jiwa datang ke kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat dan 451 jiwa datang dari luar Provinsi Sumatera Barat. Lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Penduduk Menurut Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk

KECAMATAN	MIGRASI KELUAR ANTAR KAB/KOTA DALAM PROPINSI			MIGRASI KELUAR ANTAR KAB/KOTA ANTAR PROPINSI			MIGRASI MASUK DARI KAB/KOTA DALAM PROPINSI			MIGRASI MASUK SARI KAB/KOTA ANTAR PROPINSI		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK2+PR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK2+PR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK2+PR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LK2+PR
PANCUNG SOAL	62	46	108	131	114	245	308	247	555	390	451	841
RANAH PESISIR	82	80	162	243	186	429	270	181	451	951	679	1.630
LENGAYANG	194	170	364	436	336	772	746	668	1.414	1110	948	2.058
BATANG KAPAS	119	107	226	337	283	620	341	278	619	885	743	1.628
IV LURAI	230	197	427	352	317	669	539	489	1.028	972	870	1.842
BAYANG	128	131	259	436	434	870	511	468	979	1116	1118	2.234
KOTO XI TARUSAN	262	202	464	494	453	947	881	845	1.726	1422	1228	2.650
SUTERA	106	107	213	199	174	373	296	256	552	1204	1221	2.425
LINGGO SARI BAGANTI	79	75	154	315	268	583	347	359	706	859	833	1.692
LUNANG	22	18	40	95	68	163	122	156	278	443	464	907
BASA AMPEK BALAI TAPAN	17	16	33	75	55	130	50	61	111	237	203	440
IV NAGARI BAYANG UTARA	25	29	54	89	60	149	43	23	66	247	204	451
AIRPURA	21	24	45	69	56	125	232	214	446	310	243	553
RANAH AMPEK HULU TAPAN	11	10	21	71	62	133	175	125	300	289	224	513
SILAUT	14	21	35	93	102	195	135	97	232	442	415	857
TOTAL PESISIR SELATAN	1,372	1,233	2,605	3,435	2,968	6,403	4,996	4,467	9,463	10,877	9,844	20,721

Grafik 22. Penduduk Menurut Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk





BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain.

Pemerintah Daerah sudah berupaya melakukan pelayanan publik melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan memiliki dokumen kependudukan dengan memperkuat akurasi database penduduk serta mempermudah pelayanan publik. Kepemilikan dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan (bagi non muslim), Akta Perceraian (bagi non muslim) dan surat dokumen kependudukan lainnya mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Dalam aplikasi terbaru Siak Versi 7.3.1 sekarang memuat Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,



serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan, status kecacatan, golongan darah, tanggal perkawinan, nomor surat/akta nikah, kawin tercatat atau belum tercatat dan lain sebagainya.

Tabel 23. menunjukkan jumlah keluarga dan yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan dari 148.084 keluarga, sebanyak 146.594 keluarga telah memiliki Kartu Keluarga. Hanya 1.490 keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga. Ini artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil dalam mengajak masyarakat untuk memiliki Kartu Keluarga, sehingga hal ini perlu dilanjutkan dan lebih memotivasi lagi masyarakat untuk memperbaharui/mengupdate data kependudukannya.

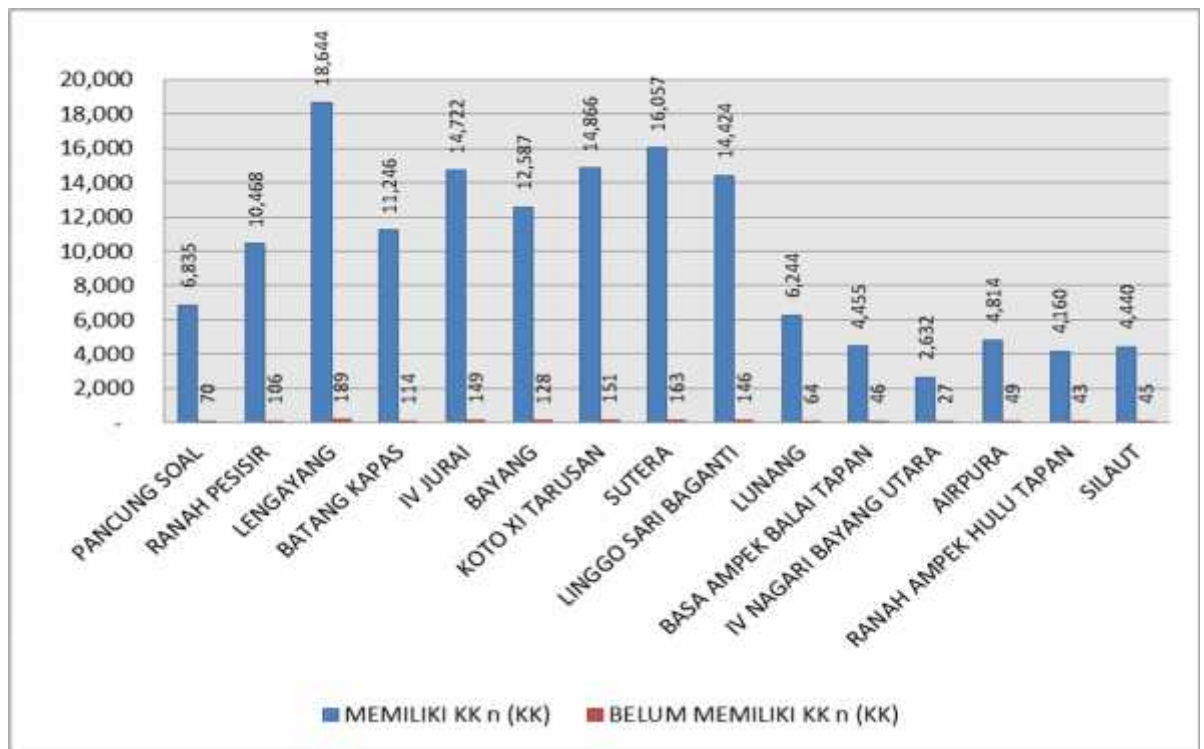
Jika menurut kecamatan, maka persentase kepemilikan KK yang paling tinggi adalah Kecamatan Lengayang (12.7%) dan paling sedikit kepemilikan KK adalah IV Nagari Bayang Utara (1.8%), sedangkan paling tinggi belum cetak KK adalah Kecamatan Bayang 189 Keluarga (0,13%) dan sedikit belum cetak KK adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 27 Keluarga (0.02%).

Tabel 23. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

KODE KEC	KECAMATAN	MEMILIKI KK		BELUM MEMILIKI KK		KELUARGA	
		n (KK)	%	n (KK)	%	n (KK)	%
130101	PANCUNG SOAL	6,835	4.6	70	0.05	6,905	4.7
130102	RANAH PESISIR	10,468	7.1	106	0.07	10,574	7.1
130103	LENGAYANG	18,644	12.6	189	0.13	18,833	12.7
130104	BATANG KAPAS	11,246	7.6	114	0.08	11,360	7.7
130105	IV JURAI	14,722	9.9	149	0.10	14,871	10.0
130106	BAYANG	12,587	8.5	128	0.09	12,715	8.6
130107	KOTO XI TARUSAN	14,866	10.0	151	0.10	15,017	10.1
130108	SUTERA	16,057	10.8	163	0.11	16,220	11.0
130109	LINGGO SARI BAGANTI	14,424	9.7	146	0.10	14,570	9.8
130110	LUNANG	6,244	4.2	64	0.04	6,308	4.3
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4,455	3.0	46	0.03	4,501	3.0
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	2,632	1.8	27	0.02	2,659	1.8
130113	AIRPURA	4,814	3.3	49	0.03	4,863	3.3
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4,160	2.8	43	0.03	4,203	2.8
130115	SILAUT	4,440	3.0	45	0.03	4,485	3.0
TOTAL KABUPATEN		146,594	99.0	1,490	1.01	148,084	100.0
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							



Grafik 23. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)



B. Kepemilikan Akta Kelahiran

Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Faktor atau penyebab kegagalan pencatatan anak salah satunya adalah kealpaan pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran anak terutama anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu disebabkan juga oleh kelalaian orang tua si anak dalam melakukan pencatatan.

Akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.



Salah satu hal penting yang melekat pada diri manusia adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Hak-hak Anak diberbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM maupun Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Dari Tabel 24, terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil memenuhi target capaian nasional terhadap cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak (penduduk usia 0 – 18 tahun) yaitu sampai semester II tahun 2018 telah mencapai 98,2% atau sebesar 171.541 jiwa anak telah memiliki Akta Kelahiran dari jumlah anak sebanyak 174.691 jiwa. Capaian ini telah diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan diberikannya penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan



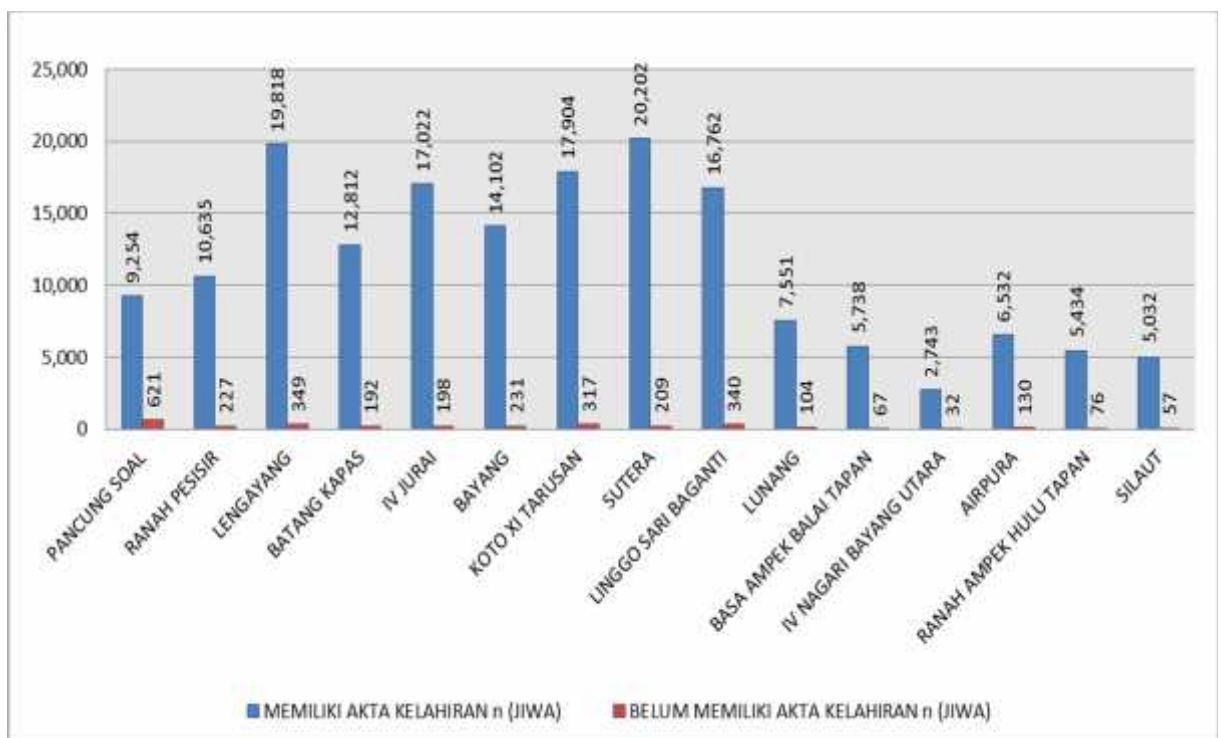
Perlindungan Anak kepada Kabupaten Pesisir Selatan yang diterima langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Bpk. H. HENDRAJONI, SH. MH pada tahun 2017 yang lalu.

Tabel 24. Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk Anak

KODE KEC	KECAMATAN	PENDUDUK ANAK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN		BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	
			n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
130101	PANCUNG SOAL	9,875	9,254	93.7	621	6.3
130102	RANAH PESISIR	10,862	10,635	97.9	227	2.1
130103	LENGAYANG	20,167	19,818	98.3	349	1.7
130104	BATANG KAPAS	13,004	12,812	98.5	192	1.5
130105	IV JURAI	17,220	17,022	98.9	198	1.2
130106	BAYANG	14,333	14,102	98.4	231	1.6
130107	KOTO XI TARUSAN	18,221	17,904	98.3	317	1.7
130108	SUTERA	20,411	20,202	99.0	209	1.0
130109	LINGGO SARI BAGANTI	17,102	16,762	98.0	340	2.0
130110	LUNANG	7,655	7,551	98.6	104	1.4
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	5,805	5,738	98.9	67	1.2
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	2,775	2,743	98.9	32	1.2
130113	AIRPURA	6,662	6,532	98.1	130	2.0
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	5,510	5,434	98.6	76	1.4
130115	SILAUT	5,089	5,032	98.9	57	1.1
TOTAL PESISIR SELATAN		174,691	171,541	98.2	3,150	1.8

Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018

Grafik 24. Kepemilikan Akta Kelahiran





C. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP Elektronik wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

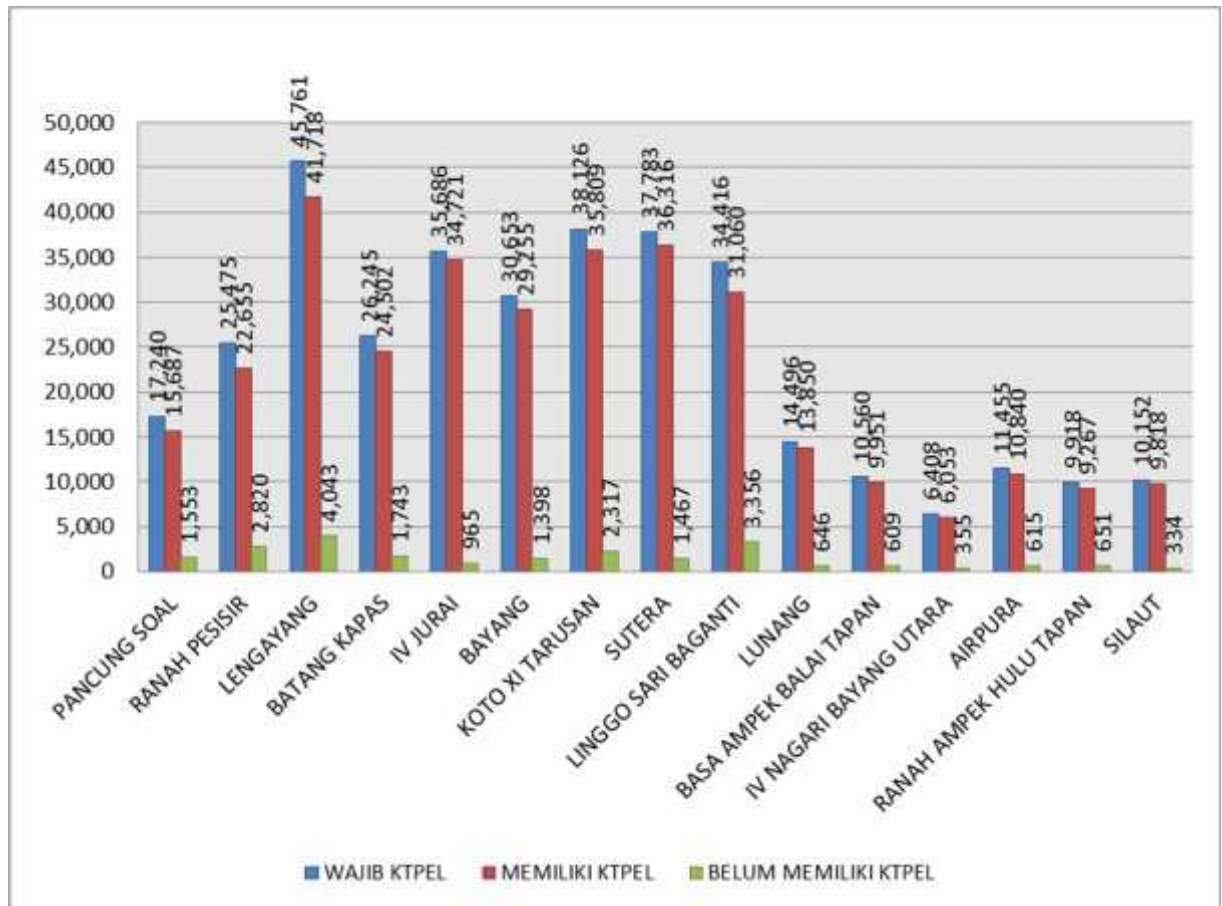
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel 25, menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut kepemilikan KTP-el.

Tabel 25. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

KODE KEC	KECAMATAN	WAJIB KTPEL		MEMILIKI KTPEL		BELUM MEMILIKI KTPEL	
		n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
130101	PANCUNG SOAL	17,240	4.9	15,687	4.4	1,553	0.4
130102	RANAH PESIR	25,475	7.2	22,655	6.4	2,820	0.8
130103	LENGAYANG	45,761	12.9	41,718	11.8	4,043	1.1
130104	BATANG KAPAS	26,245	7.4	24,502	6.9	1,743	0.5
130105	IV JURAI	35,686	10.1	34,721	9.8	965	0.3
130106	BAYANG	30,653	8.6	29,255	8.3	1,398	0.4
130107	KOTO XI TARUSAN	38,126	10.8	35,809	10.1	2,317	0.7
130108	SUTERA	37,783	10.7	36,316	10.2	1,467	0.4
130109	LINGGO SARI BAGANTI	34,416	9.7	31,060	8.8	3,356	0.9
130110	LUNANG	14,496	4.1	13,850	3.9	646	0.2
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	10,560	3.0	9,951	2.8	609	0.2
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	6,408	1.8	6,053	1.7	355	0.1
130113	AIRPURA	11,455	3.2	10,840	3.1	615	0.2
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	9,918	2.8	9,267	2.6	651	0.2
130115	SILAUT	10,152	2.9	9,818	2.8	334	0.1
TOTAL PESIR SELATAN		354,374	100.0	331,502	93.5	22,872	6.5
Sumber : Database Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018							



Grafik 25. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)



Dari Tabel 25, terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah cukup berhasil memenuhi target kepemilikan KTP Elektronik dan secara nasional berada pada zona hijau atau wilayah aman, karena telah mencapai 93,5% atau sebesar 331.502 jiwa penduduk wajib KTP telah memiliki KTP Elektronik dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 354.374 jiwa.



BAB VII

PENUTUP

Data Kependudukan saat ini telah menjadi sumber data utama untuk memberikan gambaran data kependudukan terkini di Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk dalam mengukur kemajuan pembangunan daerah. Dari gambaran tersebut akan dihasilkan sejumlah rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian dan sebagai data dasar bagi pendataan pada sektor lain yang berkaitan dengan kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan tidak terbatas pada urusan Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi dan Penegakan Hukum serta Pencegahan Kriminal. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai alat kerja berbasis teknologi sistem informasi pengolah data kependudukan yang sudah terpusat ke Data Center di Kementerian Dalam Negeri, dapat memberikan gambaran mengenai status penduduk Kabupaten Pesisir Selatan secara online

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 keadaan 31 Desember 2018 ini diharapkan dapat digunakan oleh semua lembaga pemerintah dan swasta. Data yang digunakan dan diolah serta disajikan secara berkala pada buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan, bersumber dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dimasa mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih akurat dan valid, antara lain dengan mempererat lagi sistem koordinasi bersama dinas/instansi yang lain. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri masyarakat. Diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan di Kantor Unit Kerja Layanan (UKL) yang ada di setiap Kecamatan, dapat mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melaporkan apabila



terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.

Data tersebut sudah dapat memberikan rekomendasi untuk menyusun kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pihak pengguna dalam hal seperti Kami menyadari bahwa buku Profil perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan profil perkembangan kependudukan mendatang, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan di tahun yang akan datang.

Semoga buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Semester 2 Tahun 2018 (Per 31 Desember 2018) ini dapat berguna bagi kita semua pihak, khususnya bagi pada pengambil kebijakan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan.